

Sang Pangeran yang Disayang KPK

AKTUAL

Edisi 48 | 18 - 31 Januari 2016

Intrik Industri Listrik

Waspada! regulasi di industri energi baru dan terbarukan



ISSN 2337-8395



Rp. 30.000

WWW.AKTUAL.COM



Swastanisasi PLN

...kapitalisme global sejak paska swastanisasi kelistrikan di Indonesia Bank Dunia sejak 1997, agaknya jadi memasuki zona merah neoliberalisme.

Misalnya, ketika pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal mencapai 8 persen per tahun, maka perkiraan pertumbuhan kelistrikan adalah 100 persen. Ini yang disebut dengan meter kontraksi sebesar 100 persen atau membuat kontraksi 100 persen atau pertumbuhan 100 persen. Dengan membuat kontraksi 100 persen atau pertumbuhan 100 persen, maka pertumbuhan kelistrikan akan mencapai 100 persen. Ini yang disebut dengan meter kontraksi sebesar 100 persen atau membuat kontraksi 100 persen atau pertumbuhan 100 persen.

Independence Power Production (IPP) Mula, tak lama setelah swastanisasi kelistrikan di Indonesia, PLN mulai melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi.

Pada tahun 1997, PLN mulai melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Langkah-langkah ini meliputi: 1. Mengurangi biaya produksi dengan cara meningkatkan efisiensi. 2. Mengurangi biaya distribusi dengan cara meningkatkan efisiensi. 3. Mengurangi biaya pemasaran dengan cara meningkatkan efisiensi.

Namun, itu bukan alasan untuk mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi PLN. Masalah-masalah ini meliputi: 1. Masalah keuangan. 2. Masalah teknis. 3. Masalah manajemen.

Selain itu, juga melalui skema didorong agar membangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), tenaga panas bumi (PLTP), tenaga uap dengan bahan bakar batu bara (PLTU), tenaga uap berbahan bakar

kemudian di Alhasil, mencari dan investasi di campur tangan tahapan ekonomi sektor. Pengorbanan dari para pelaku ke sektor. Sebagai terganggu energi domestik.

Tentu saja kerja untuk tahapan awal untuk menerapkan para perancang ekonomi di Washington dalam meliberalisasikan dan swastanisasi kelistrikan Indonesia. Rencana makro kelistrikan Perkins untuk mememankan penerapannya privatisasi PLN pada 1997, setahun menjelang kejatuhan Presiden Suharto pada Mei 1998.

Kalau kita menelusuri kembali aksi subversif korporasi-korporasi energi global AS melalui IMF dan Bank Dunia, sebenarnya mereka sudah mengincar sektor ketenaga-listrikan Indonesia sejak 1970-an. Lagi-lagi Perkins punya cerita menarik tentang soal ini. Waktu itu, Pemerintah tentang Listrik Masuk Desa atau Prolisdes, Sepintas kalau kita lihat secara kasat mata, gagasan tersebut sangat mulia mengingat yang disasar dari proyek ini adalah masyarakat desa. Namun agenda yang sesungguhnya, menurut pengakuan Perkins, Prolisdes merupakan salah satu strategi CIA untuk memprovokasi pemerintah Indonesia agar terjebak dalam skema utang luar negeri dengan dalih untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Selain itu, juga melalui skema didorong agar membangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), tenaga panas bumi (PLTP), tenaga uap dengan bahan bakar batu bara (PLTU), tenaga uap berbahan bakar

Rencana BUMN
Kategori: Ketenagalistrikan
Bidang: Merang
Perubahan: Secara bertahap
Menerapkan: di sektor k
yang tadinya,

Caprof
Media Negeri
enlightenment and harmony

Berita teraktual tersaji,
untuk Anda mengawali hari ...

Info Dan Pemasaran :
☎ 0812 053 8776 (Deddy) | 0838 210 4469 (Ranie) | 0818 2809 41 009 (Rhiza)
✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com
🌐 www.aktual.com

PENDIRI M. Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony

REDAKTUR Wahyu Romadhony, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)
ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M. Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan

STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Leonina K Lahama, Eko Sumaryanto (Foto Komersial), Agung Rizki, Dadangsa, Najamuddin Arfah, Refli Mulyadi, Fatah Hidayat Sidik.

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

NETWORK Tri Wahyudi (Hd), Rendra Muhammad Nur Islam

SMC Resya Muhammad Irgi, Taufik, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A. Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu).

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah
STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P
HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana
SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji
MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza Adittha
ADMIN MARKETING Yulita Trinanda Pangastuti

ALAMAT REDAKSI
Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810
Telp. 021 83794508 (Hunting)
Fax: 021 83794706

redaksi@aktual.com
iklan@aktual.com

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

aktual
NEWS

Intrik Industri Listrik

Pembaca yang budiman. Seminggu lalu, Jakarta diguncang bom. Ledakannya membuat beberapa orang tewas (termasuk yang diduga teroris) dan mengalami luka parah dan ringan.

Selama seminggu itu, semua perhatian masyarakat tertuju pada peristiwa tersebut. Hampir semua media sosial memberitakan peristiwa tersebut dari banyak sisi dan analisis.

Perhatian dan kemarahan masyarakat atas peristiwa tersebut seakan melupakan beberapa kemarahan yang terjadi sebelumnya. Ada beberapa catatan penting peristiwa ekonomi-politik yang direkam redaksi sebelum peristiwa tersebut yakni soal sengkabut Freeport, soal tarik ulur harga listrik antara PLN dan Pertamina, soal blok Masela dan lainnya.

Laporan Utama kali ini, kami berusaha menyajikan "warning" kepada pemerintah soal polemik harga listrik yang dihasilkan dari proyek-proyek energi baru terbarukan. Regulasi di sektor energi baru terbarukan di Indonesia masih sangat lemah. Ini jadi sasaran empuk buat mafia energi untuk masuk.

Apalagi, dalam kolomnya, Ichsanurudin Noorsy mengingatkan bahwa perekonomian tahun 2016 ini bisa saja tidak lagi "bersahabat". Peringatan Ichsan tersebut hendaknya dibaca bahwa karena perekonomian 2016



dianggap memburuk maka pemerintah jangan menjadikan alasan untuk membabi-buta menerima investasi asing demi menyelamatkan pertumbuhan ekonomi. Ini catatan pentingnya.

Di rubrik ekonomi, kita masih menyorot soal Freeport. Sudah saatnya Indonesia memutuskan untuk Freeport hengkang dari Indonesia. Freeport sudah terlalu banyak merugikan Indonesia. Apalagi, Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan secara terbuka bahwa keberadaan Freeport di Indonesia harus dikaji ulang. Ini pernyataan penting Mega terhadap sikap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla soal sengkabut Freeport.

Di rubrik hukum, kami menyajikan sebuah tulisan soal mencuatnya lagi nama Ibas di kasus Nazaruddin. Perlu diketahui, selama kepemimpinan Abraham Samad, meski nama putra bungsu Presiden ke-6 RI itu sering disebut namun KPK tidak pernah mampu menghadirkan Ibas ke persidangan. Benarkah KPK berani menghadirkan sang Pangeran itu?

Beberapa rubrik menarik juga kami sajikan di Edisi kali ini....

Selamat membaca

LAPORAN UTAMA

24 Mengeksplorasi Listrik dari Sinar Matahari

Pemerintah harus segera memperbesar pemanfaatan energi baru terbarukan, karena energi fosil tidak akan bertahan lama. Salah satu alternatif itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya.



26 Evo Morales, Inspirasi dari Amerika Latin Melawan Skema Ekonomi Konsensus Washington

Ketika terpilih menjadi presiden Bolivia pada 2005, Morales seketika itu juga tahu bahwa akar keterpurukan ekonomi Bolivia berakar dari kemauan para elit politik pendahulunya menuruti permintaan IMF, Bank Dunia, Wall Street dan Washington.



30 Mafia dan Geopolitik Energi Baru Terbarukan

Ketika terpilih menjadi presiden Bolivia pada 2005, Morales seketika itu juga tahu bahwa akar keterpurukan ekonomi Bolivia berakar dari kemauan para elit politik pendahulunya menuruti permintaan IMF, Bank Dunia, Wall Street dan Washington.



14 AKTUAL REVIEW

Mengenang Komunitas Mahasiswa Prapatan-10, Menteng 31, dan Cikini 71

Siapa sangka, jika sebuah gedung yang berlokasi di jalan Prapatan No 10, yang terletak dekat pasar Senen pada Jalan kembar Prapatan Kwitang, pernah mengukir sejarah sebagai tempat penggemblengan para pemuda-mahasiswa yang membidani lahirnya para pemimpin bangsa yang kelak dikenal sebagai Angkatan 45.

20 POLITIK

Pesan Khusus Megawati untuk Jokowi

Pidato Megawati di rakernas PDIP membuat wacana akan terjadinya *reshuffle* kabinet kerja semakin diyakini akan terjadi.

34 HUKUM

Sang Pangeran Disayang KPK

Bagaimana kabar keluarga Cikeas setelah Susilo Bambang Yudhoyono tak lagi menjabat sebagai petinggi negara? Apalagi, nama anak bungunya yakni Edhie Baskoro Yudhoyono kembali harum di sidang Muhammad Nazaruddin.

40 OPINI

Ichsanuddin Noorsy: Mengantisipasi Resesi Ekonomi 2016 dan Kewaspadaan Bangsa

Caranya bukan dengan menempatkan diri sebagai obyek, tapi sebagai subyek-obyek, obyek-subyek. Saya menyebut posisi ini sebagai close-open circuit system. Dengan posisi ini, darah (sebagai kata ganti uang, atau utang luar negeri) tidak boleh dipasok dari pihak luar.

42 EKONOMI

MoU Freeport Segera Berakhir, Negara Tidak Boleh Lagi Kecolongan

Indonesian Resources Studies (IRESS) mendesak pemerintah untuk tidak hanya menolak izin perpanjangan ekspor konsentrat Freeport, tetapi juga menolak perpanjangan izin tambang kepada PT Freeport. Peneliti IRESS, Marwan Batubara mengungkapkan, pemerintah RI juga diminta untuk tidak perlu proaktif dalam program divestasi saham Freeport.

48 INTERNASIONAL

Membaranya Hubungan Saudi-Iran

Rusaknya hubungan Iran-Saudi membuat kawasan Timur Tengah semakin panas. ISIS dan Israel diuntungkan. Indonesia berinisiatif, untuk mencoba menjadi penengah.

50 LIFE

Gelombang Gravitasi Ditemukan, Awal Ketahui 'Rahasia' Alam Semesta

Gravitasi Ditemukan! Kosmolog dari Arizona State University, Lawrence Krauss mulai berspekulasi di dalam Twitter-nya, "Gelombang gravitasi Alam Semesta mungkin telah ditemukan !!," sebelum rumor ini dihembuskan serta diverifikasi oleh Lembaga resmi terkait.

Lengkapi kebutuhan informasi terkini dengan mengunduh Portal berita Aktual di smartphone Android Anda. Berita tersaji selama 24 jam dalam 7 hari seminggu dengan standar jurnalisme berkualitas yang meliputi berbagai peristiwa nasional maupun internasional.

Interoffice Memorandum
PTFI Management

Kepada/ To:	Semua Karyawan / All Employees	Tempat/ Place:	Seluruh Lokasi PTFI / All PTFI Locations
Perihal/ Subject:	Pesan dari Bapak Maroef Sjamsoeddin / Memo from Maroef Sjamsoeddin		
Dari/ From:	Bapak Maroef Sjamsoeddin	Tanggal/ Date:	18 Januari 2016 / January 18, 2016

Dengan berakhirnya masa kontrak kerja saya selama setahun sebagai karyawan pada posisi jabatan yang dipercayakan sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan tawaran perpanjangan dari Pimpinan Freeport McMoRan, saya telah berikirim surat pengajuan pengunduran diri sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama saya menjalankan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh manajemen Perusahaan Induk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Demikian dan terimakasih.

Jakarta, 18 Januari 2016

Hormat saya,

Marsda TNI (Purn) Maroef Sjamsoeddin.

With regard to the expiration of my employment contract for a year as an employee in the entrusted position of President Director of PT Freeport Indonesia, and the extension offering from the leaders of Freeport McMoRan, I have sent my resignation letter as the President Director of PT Freeport Indonesia.

I would like to take this opportunity to convey my gratitude for the good cooperation from all parties who have been involved directly and indirectly as I performed the duties and functions entrusted by the management of the Parent Company as the President Director of PT Freeport Indonesia.

Thus conveyed and thank you.

Jakarta, 18 January 2016

Sincerely yours,

Air Vice Marshall TNI (Ret.) Maroef Sjamsoeddin

ESDM: Freeport Sudah Tawarkan Divestasi 10,64% Saham, Harganya USD1,7 M

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, jika Freeport telah mengajukan penawaran harga sahamnya sebelum deadline pada tanggal 14 Januari 2016

"Freeport telah mengirim surat kepada menteri esdm pada hari Rabu kemarin. Mereka sudah mengajukan penawaran harga saham sebagai bagian dari kewajiban divestasi 10,64 persen saham," ujar Bambang kepada wartawan di Balai Kartini, Kamis (14/1).

Bambang menuturkan, Freeport telah menawarkan sahamnya sesuai dengan kewajiban PP 77 Tahun 2014. Dimana mereka harus menawarkan 10,64 persen. Tentunya dalam penawaran tersebut telah disampaikan juga besarnya yang 100 persen itu adalah USD16,2 Miliar.

"Jadi 10,64 persennya senilai USD1,7 miliar telah ditawarkan ke kita," ungkapnya.

Olehnya itu, saat ini kementerian ESDM akan melakukan evaluasi terhadap penawaran tersebut.

"Jadi menjadi tugas pemerintah untuk memberikan evaluasi terhadap valuasi yang telah disampaikan oleh freeport. Untuk batas waktu yang kita berikan dalam melakukan evaluasi belum bisa kami sampaikan," ucapnya. *Arbie Marwan*



Maroef Sjamsoeddin Mundur Dari Presdir Freeport!

Maroef Sjamsoeddin dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Kabar mundurnya Maroef diketahui dari tersebarnya surat pengunduran dirinya di media massa. Berikut surat pengunduran diri Maroef tertanggal Senin 18 Januari 2016:

Kepada: Seluruh Karyawan
Perihal: Pesan dari bapak Maroef Sjamsoeddin
dari: Bapak maroef Sjamsoeddin

Dengan berakhirnya masa kontrak kerja saya selama setahun sebagai karyawan pada posisi jabatan yang dipercayakan sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan tawaran perpanjangan dari Pimpinan Freeport McMoRan, saya telah berikirim surat pengajuan pengunduran diri sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung selama menjalankan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh manajemen Perusahaan Induk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Demikian dan terimakasih
Jakarta, 18 Januari 2016

Hormat Saya
Marsda TNI (Purn) Maroef Sjamsoeddin

Wahyu Romadhoni



Merdeka Tanpa Kepemimpinan

Di muka hakim kolonial, pada bagian penutup dari pleidoi “Indonesia Menggugat” (1930), Soekarno bertutur: *“Kami menyerahkan segenap raga dengan serela-relanya kepada tanah air dan bangsa... Juga kami adalah berusaha ikut mengembalikan hak tanah air dan bangsa atau peri kehidupan yang merdeka. Tiga ratus tahun, ya walau seribu tahun pun, tidaklah bisa menghilangkan hak negeri Indonesia dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan itu.”*

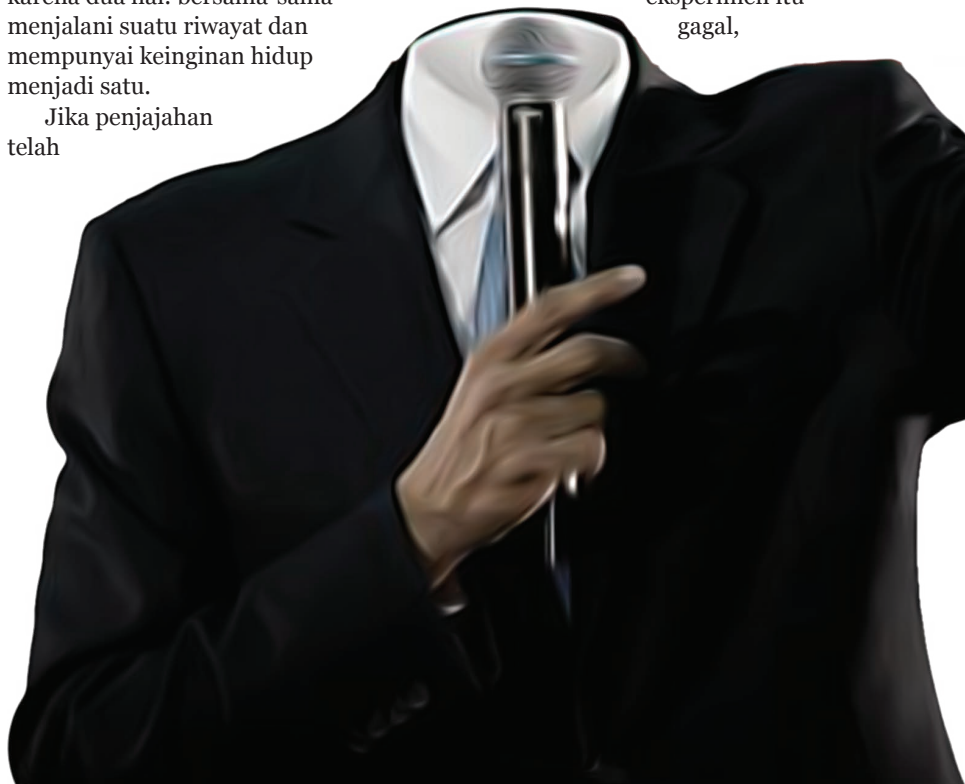
Dengan pernyataan itu, Soekarno menambatkan perjuangan kemerdekaan Indonesia ke dalam jangkar “kebangsaan”. Suatu bangsa, menurut Ernest Renan, terbentuk karena dua hal: bersama-sama menjalani suatu riwayat dan mempunyai keinginan hidup menjadi satu.

Jika penjajahan telah

memberi kesamaan riwayat bagi mayoritas penduduk Indonesia, atas dasar imajinasi apakah keinginan hidup untuk bersatu bisa dirajut? Suatu bangsa, kata Ben Anderson, adalah “suatu komunitas politik terbayangkan”; terbayangkan dalam arti selalu menyiratkan “batas” dan “daulat”.

Dalam sejarah Indonesia, berbagai eksperimen pergerakan bergulat dan acapkali bergesekan dalam menentukan batas dan daulat ini. Budi Utomo membatasi imajinasi persatuan kebangsaan itu pada “kejawaan”, Indische Partij pada “kependudukan”, Sarekat Islam pada “keislaman” dan Komunisme Indonesia pada “solidaritas kelas”.

Tetapi semua eksperimen itu gagal,



hingga semua gerakan terpaksa (oleh tekanan sejarah) menyadari perlunya mempertautkan diri ke dalam suatu *historical bloc*; suatu kompleks “kehendak kolektif” yang dihasilkan oleh pertautan ide dan nilai dari berbagai kekuatan sejarah yang tersebar dan terpecah.

Memasuki 1920-an/1930-an, di bawah tekanan malaise ekonomi pasca Perang Dunia I dan depresi ekonomi dunia, negara kolonial semakin menunjukkan watak paranoidnya dengan mengaktifkan rezim “*rust en orde*” (ketentraman dan ketertiban).

Di bawah rezim *drakonian* ini, media massa dan rapat umum dikontrol ketat, tokoh-tokoh politik terkemuka ditangkap dan diasingkan. Saat yang sama, kelesuan ekonomi membiakkan kemiskinan dan proletariat intelektual yang menyulut radikalisme. Secara perlahan, semua elemen pergerakan mulai dipersatukan ke dalam blok historis untuk

memerdekakan diri dari musuh bersama: negara kolonial.

Dari Belanda, Bung Hatta dan koleganya di Perhimpunan Indonesia mengajukan konsepsi kemerdekaan dengan empat pilar: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi dan kemandirian. Tak lain adalah sintesis dari platform politik gerakan-gerakan perjuangan terdahulu. Persatuan nasional merupakan tema Indische Partij, non-kooperasi tema kaum komunis, dan kemandirian

tema Sarekat Islam. Sedangkan solidaritas hanyalah simpul yang menyatukan ketiga tema tersebut.

Dari dalam negeri, Soekarno dan sejawatnya datang dengan proposal serupa. Pada 1926, ia menulis di Suluh Indonesia Muda, “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, yang memimpikan sintesis antara ketiga ideologi tersebut sebagai fondasi persatuan nasional dan kemerdekaan.

Semuanya tiba pada *kalimatun sawa*, perlunya mengutamakan kemerdekaan politik. Tidak berarti meremehkan persoalan sosio-ekonomi dan tidak pula merupakan sifat multikultur keindonesian. Mereka menyadari bahwa perjuangan nasionalisme Indonesia tidaklah berhenti pada kemerdekaan politik, tetapi harus berlanjut dengan apa yang disebut Sukarno sebagai “sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi”; yakni “nasionalisme dan demokrasi yang mencari selamatnya perikemanusiaan dengan mencari keberasan politik dan keberasan ekonomi, keberasan negeri dan keberasan rezeki”.

Kebanyakan mereka juga menyadari perlunya menyelamatkan kemajemukan Indonesia dari sangkar besi sentralisme negara kolonial. Namun, bagi mereka, kemerdekaan harus diraih terlebih dahulu, dan hanya Indonesia bersatu, yang bersedia menyingkirkan perbedaan-perbedaan sempitlah, yang bisa meruntuhkan negara kolonial.

Di sini terlihat keunikan formasi negara-bangsa Indonesia. Dalam trayek Eropa Barat, perkembangan kesadaran nasional berjalan paralel dengan formasi negara-(bangsa), sedang di Eropa Tengah/Timur terbentuknya negara-bangsa itu merupakan perpanjangan dari kesadaran etno-kultural. Adapun di Indonesia, negara (baca: negara kolonial) ada terlebih dahulu, kemudian muncul kesadaran dan persatuan nasional sebagai reaksi terhadap negara kolonial.

Dalam literatur sosiologi politik, Indonesia lebih tepat disebut “*state-*

nation”, ketimbang “*nation-state*”. Konsekuensinya, negara merupakan alasan pokok bagi konstruksi maupun destruksi rasa kebangsaan.

Dengan konsentrasi pada penempatan “*nation building*” sebagai karsa menggulingkan “negara kolonial”, perhatian terhadap “*state building*” nyaris tak terpikirkan. Padahal dengan berlalunya kolonial, berbagai warisan penjajahan dalam tata-kelola kenegaraan menyusup lewat pintu belakang republik, melanggengkan struktur-struktur ketidakadilan yang menyulitkan perwujudan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Keberhasilan para perintis kemerdekaan membentuk kesadaran nasionalisme baru, tidak diikuti oleh keberhasilan dalam pembangunan kenegaraan. Konstruksi blok historis warisan pra-kemerdekaan tidak bisa dipertahankan karena ketidakmampuan pemimpin pascakolonial untuk mendefinisikan dan menghadapi musuh baru yang lebih sublim: tirani, korupsi, kemiskinan dan kesenjangan.

Untuk masa yang panjang terjadi ketidakselarasan antara watak kenegaraan dan kebangsaan. Watak multikultur kebangsaan Indonesia dinafikan oleh watak sentralistik bangun kenegaraan. Ketimpangan antara pusat dan daerah terjadi dengan pengingkaran terhadap hak-hak politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal.

Karena penguasaan kapital oleh segelintir pihak di titik pusat, persebaran kapital yang melicinkan mobilitas vertikal dan horisontal terhambat. Sifat insular negeri kepulauan yang menyulitkan kontak dalam intensitas tinggi tak menemukan jembatan katalisnya. Situasi ini telah lama dirisaukan Bung Hatta. Membandingkan pengalaman Italia (negeri agraris) dan Inggris (negeri industri) dalam mengembangkan persatuan nasional, ia temukan bahwa rasa persatuan nasional di Italia lebih rapuh.

Menurutnya, sifat petani yang terikat hatinya pada tanah

menyulitkan mobilitas dan intensitas perhubungannya dengan kalangan yang lebih luas. Rasa persatuan nasional secara umum lebih kuat di negeri industri, di mana rakyatnya yang memburuh terlepas dari ikatan tanah dan disusun bersatu oleh pabrik dan disiplin kerja. Di sini, mobilitas penduduk tidak dipaksakan, semisal lewat transmigrasi, melainkan tumbuh secara sukarela mengikuti pergerakan kapital.

Dalam ketersendatan lalu lintas pergaulan, masyarakat lebih banyak terkungkung dalam kepompong komunalisme. Pengikatan rasa kebangsaan dari ensemble komunalisme ini sekadar bertumpu pada solidaritas emosional yang tersisa dari warisan kesamaan sejarah, bahasa dan budaya-keagamaan. Tanpa solidaritas fungsional yang lahir karena persamaan kepentingan dan pemenuhan kesejahteraan bersama, fantasi kebertautan kebangsaan itu mudah retak oleh gerak sentrifugal dari ingatan pedih ketidakadilan dan keterkucilan.

Dengan proses belajar kolektif lebih banyak dimediasikan oleh paguyubuan yang tertutup, ketimbang oleh asosiasi yang terbuka, universum simbolik yang menyediakan kerangka interpretasi sosial lebih membiaskan gramatika komunalisme. Akibatnya, kekecewaan sosial-ekonomi sering disublimasikan ke dalam sentimen etno-religius.

Buruknya manajemen kenegaraan melemahkan horizontal *comradeship* antar gugus kebangsaan. *Civic nationalism* sebagai watak kebangsaan Indonesia terus-menerus terancam oleh etno-*nationalism*. Seperti menjadi suratan tangan, Indonesia dipersatukan oleh negara dan diceraiberaikan oleh negara.

Enam puluh satu tahun setelah Negara ini diproklamirkan, Indonesia masih tetap sebuah proyek yang belum tuntas. Setiap hari ulang tahun kemerdekaan tiba, peringatan Bung Karno kembali mencuat dari alam kuburnya: “*Ya, belum ada journey’s*

end’ bagi kita,--perjuangan kita jauh belum selesai, pembangunan pun menunggu bertimbun-timbun,--hai bangkitlah kembali bangsaku, nyalakanlah kembali dalam jiwamu apa yang kita namakan ‘semangat proklamasi’.”

Semangat Proklamasi Apakah gerakan ‘semangat proklamasi’ itu?

“Semangat proklamasi,” ujar Soekarno di ulang tahun kelima kemerdekaan Indonesia, “adalah semangat rela berjoelang, berjoelang mati-matian dengan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat-mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Semangat proklamasi adalah semangat membentuk dan membangun Negara... Dan manakala sekarang tampak tanda-tanda kelunturan dan degenerasi, kikislah bersih semua kuman kelunturan dan degenerasi itu, hidupakanlah kembali semangat proklamasi!”

Masih adakah idealisme dan semangat berjoelang di antara kita? Masih. Mahasiswa dan masyarakat madani turun kejalan, memekikkan reformasi, membebaskan negeri dari cengkraman tirani. Selepas kejatuhan Suharto, pelbagai langkah demokratisasi prosedural telah ditempuh dengan transformasi yang nyata: amandemen konstitusi, pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif *fair*, kebebasan berekspresi, keluasan akses informasi, desentralisasi dan otonomisasi, kehadiran institusi-institusi kenegaraan baru serta pemilihan presiden dan pilkada secara langsung.

Di luar arena politik, kekuatan-kekuatan swadaya masyarakat menceburkan diri di zona-zona bencana dengan ketulusan patriotis yang mengharukan. Terkenang juga para pendekar kebudayaan yang secara berdikari mengirimkan talenta-talenta terbaik bangsa ke ajang kompetisi internasional—semacam olimpiade fisika atau

festival kesenian—dan pulang dengan medali tertinggi.

Hanya saja, seperti kata sejarawan H.G. Wells, “Anasir terpenting yang menentukan nasib suatu bangsa adalah kualitas dan kuantitas tekad yang dimilikinya.” Kita punya idealisme reformasi, tetapi mudah surup oleh kepentingan-kepentingan sempit dan partikular. Kita bentuk partai politik untuk mengagregasikan aspirasi rakyat, namun lekas terpasung oleh ambisi-ambisi elit. Kita susun undang-undang baru demi kebajikan bersama, namun terdistorsi oleh kemauan “yang kuat”. Kita pilih presiden dan pilkada secara langsung demi pemberdayaan rakyat, namun mudah terbajak oleh kekuatan-kekuatan oligarkis. Kita lahirkan cerlang-cerlang individual, namun terbunuh oleh inkonsistensi dan kealpaan sistem meritokrasi.

Masih adakah semangat persatuan di antara kita? Masih. Bahasa Indonesia makin penting sebagai lingua franca, perkawinan antaretnis pun merekatkan keindonesiaan. *Elite settlement* untuk mentransformasikan elit berseteru menjadi elit bersatu dalam prinsip-prinsip dasar kenegaraan mengalami kemajuan. Fanatisisme ideologis, yang mengubur eksperimen demokrasi parlementer, relatif makin cair.

Piagam Jakarta tak lagi menjadi obsesi arus utama politik Muslim. Mayoritas elit mendukung amandemen konstitusi. Tentara rela keluar dari arena politik. Desentralisasi dan distribusi kekuasaan diterima sebagai keniscayaan. Solidaritas nasional juga terasa di kala bencana mendera.

Hanya saja, solidaritas emosional tersebut mudah roboh oleh kelemahan solidaritas fungsional, karena tak terpenuhinya cita-cita kebajikan dan kesejahteraan bersama. Solidaritas dan demokrasi, menurut Alexis de Tocqueville, memiliki makna di luar politik dan budaya: yakni kesederajatan sosial dan ekonomi. Kesetaraan sosial-ekonomi memunculkan hasrat

membentuk asosiasi-asosiasi yang terbuka, tanpa melihat dan dibedakan menurut silsilah. Pada gilirannya, perkumpulan ini melindungi kesetaraan dengan mencegah kelompok lain menjadi dominan. Dengan demikian perkumpulan ini memiliki dua fungsi: mereka berasal dari dan menjaga solidaritas dan demokrasi. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, menyimpan potensi erupsi, laksana bara dalam sekam yang dalam sekejap bisa menghancurkan ikatan-ikatan persatuan.

Masih adakah semangat membangun negara di antara kita? Masih. Alim-ulama ingatkan kebangkrutan moral, aparat pembasmi korupsi mulai beraksi, politisi pecundang perankan oposisi, tentara lepaskan aktivitas niaga, pendidik rela berupah rendah, lembaga-lembaga pemantau bersitumbuh, media massa giat beberkan keborokan, pengamat aktif mengkritisi.

Hanya saja, kita mengalami krisis keteladanan dan kepemimpinan. Seperti sindir syair Arab, “Berapa kali kau katakan, negara sedang sakit; sedang engkau adalah penyakit itu. Tunjuk hidung adalah kebiasaanmu; sedang engkau tak tampak menjaga kehormatannya.” Terlalu banyak yang mengeluh dan terlalu sedikit yang memberi contoh.

Mohammad Hatta pernah berkata: “Kualitas pemimpin sepadan dengan caranya mendapat makan.” Ketika para pemimpin negeri berpesta menikmati gaji ke-13, sibuk “jaga imej” atau memenangkan proyek, sedang rakyat banjir airmata dilanda bencana, menjadi jelas terukur bagaimana kualitas para pemimpin kita.

Sementara para pemimpin berpesta, arus neo-kolonialisme yang membonceng globalisasi semakin luas cakupannya, instan kecepatannya, dan dalam penetrasinya. Secara perlahan kantong-kantong usaha rakyat tergusur, sumberdaya alam terkuras, dan aktiva ekonomi mengalir ke pusat-pusat metropolis.

Ledekan Profesor Veith dari masa lampau makin menikam di ulu hati: “Di pantainya tanah Jawa rakyat berdesak-desakan; datang selalu tuan-tuannya setiap masa; mereka beruntun-untun sebagai runtunan awan; tapi anak-anak negeri sendiri tak pernah kuasa.”

Kemerdekaan dan kepemimpinan

Setiap kemerdekaan Indonesia diperingati, bayangan kita segera tertuju pada sepasang figur sentralnya: Soekarno dan Mohammad Hatta. Dalam suasana friksi antarfaksi di sekitar proklamasi, Soekarno-Hatta tampil sebagai jangkar keyakinan, kepercayaan dan persatuan.

Gerangan apakah yang membuat keduanya menjadi pusat teladan? Jelas, bukan karena keduanya tak punya cacat dan kekurangan. Tapi di atas segala cacat dan kekurangannya itu, keduanya memiliki modal terpenting sebagai pemimpin: moral capital.

Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat.

Ditanya oleh Direktur Penjara Landraad Bandung ikhwal “kehidupan baru” selepas bebas, Bung Karno menjawab: “Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama” (Soekarno, 1961).

Di tengah himpitan depresi ekonomi dan represi rezim *rust en orde* pada dekade 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata:

“Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu.” Lantas ditambahkan, “*Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non (syarat yang terutama) untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan*” (Hatta, 1998).

Tak hanya berbekal komitmen moral individual saja. Keduanya juga mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat seraya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan mereka.

Kemampuan Bung Karno dalam hal ini bahkan diakui oleh Bung Hatta: “*Saudara Soekarno menjadi sangat populer dan mendapat pengaruh besar di kalangan rakyat, karena kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tidak ada bandingnya di Indonesia ini.*”

Sementara itu, Bung Hatta sendiri menegaskan, “*Menduga perasaan rakyat dan memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban leiderschap!...Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya... Pemimpin mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang.*”

Kekuatan moral capital itu pada akhirnya berkemampuan mengangkat partikularitas manusia ke tingkat yang lebih tinggi, yakni level politik yang berorientasi kebajikan bersama dalam rumah kebangsaan. “*Bahwa keadaan bangsa,*” ujar Bung Hatta, “*tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk*

bersatu.”

Ditambahkan oleh Bung Karno, “*Di seluruh negeri kita, yang kelihatan hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. Di dalam keadaan yang demikian itulah kita memulai perjuangan kebangsaan kita...Dengan kehendak yang membulat menjadi satu, ketetapan-hati yang menggumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, seluruh bangsa kita bangkit, bergerak, berjuang untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu.*”

Belajar dari kedua mahaguru bangsa tersebut, setidaknya ada empat sumber utama bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan, menjaga, dan memobilisasi “moral capital” secara politik.

Pertama, basis moralitas; menyangkut nilai-nilai, tujuan serta orientasi politik yang menjadi komitmen dan dijanjikan pemimpin politik kepada konstituennya. Kedua, tindakan politik; menyangkut kinerja pemimpin politik dalam menerjemahkan nilai-nilai moralitasnya ke dalam ukuran-ukuran perilaku, kebijakan, dan keputusan politiknya. Ketiga, keteladanan; menyangkut contoh perilaku moral yang konkret dan efektif, yang menularkan kesan otentik dan kepercayaan kepada komunitas politik. Keempat, *consensus building*; kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam bentuk bahasa politik yang efektif, yang mampu memperkuat solidaritas dan moralitas masyarakat.

Dalam suasana krisis nasional sekarang ini, sosok kepemimpinan kedua pahlawan tersebut perlu diungkap. Sulitnya pemulihan krisis yang Indonesia hadapi hari ini terutama bukan karena defisit sumberdaya dan orang pintar, melainkan karena bangkrutnya moral capital dari para pemimpin politik.

Terlalu sedikit panutan dan terlalu banyak pengkhianat membuat jagad politik kehilangan pahlawan.

Tatkala nama pahlawan disebutkan, kita terpaksa harus menoleh ke batu nisan. Pahlawan terlanjur dikuburkan, meninggalkan jagad politik dalam kealpaan panduan. Mereka yang mendambakan teladan, terpaksa harus mencari di dunia rekaan.

Jika ada yang paling salah dalam proses pembelajaran politik di negeri ini, tak lain bahwa pahlawan selalu ditempatkan di kesilaman, tak pernah dihadirkan di kekinian pentas politik. Kita terlanjur mendefisikan politik sebagai arena kecurangan, yang tidak memberi tempat bagi persemaian para pahlawan. Dalam penghayatan politik kita, pahlawan selalu merupakan pertanda kematian, tidak pernah menjajikan kehidupan. Jalan politik menjadi jalan pengkhianatan, sedang kerancuan politik menjadi kewajaran yang dipertahankan. Maka Indonesia menjadi terkenal di pentas dunia karena capaian yang salah.

Demokrasi dengan Kepemimpinan yang Lemah

Ketika reformasi digulirkan, terdapat optimisme yang meluas bahwa demokrasi bisa melahirkan kepemimpinan yang cocok dengan watak bangsanya. Apa yang terjadi, pendulum sejarah Indonesia hanyalah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas.

Padahal, demokrasi memang bermaksud membasmi pemerintahan otoriter, tetapi tak bisa tegak tanpa pemerintahan otoritatif. Kenyataan kini, aneka peraturan dan pembangunan tak jalan karena lemahnya wibawa otoritas atas gerombolan.

Memimpin demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat menjadi simpul kesadaran baru yang terpancar dari suara Wakil Presiden Jusuf Kalla (Kompas, 08/06.2006). Keinsyafan ini merupakan pertanda baik jika disertai pemahaman yang baik. Bahwa pemimpin yang baik tidak cukup sekadar berbudi baik dan menarik. Yang lebih penting adalah kesanggupan untuk menginvestasikan potensi kebajikan

perseorangan ini ke dalam mesin politik dan pemerintahan yang bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Terlampau lama Republik ini dipimpin oleh Presiden yang “lemah”. Presiden yang menegakkan wibawanya dengan personalisasi kekuasaan dan kekuatan pemaksa (*might*), bukan dengan menjalankan prinsip-prinsip negara hukum (*right*) yang bersifat impersonal dan imparsial.

Jejak-jejak tradisi kepresidenan seperti itu masih bertahan pada watak para pemimpin negara di era reformasi: dalam kecenderungannya untuk memprioritaskan kepentingan sendiri dan pemujaan diri, dengan keengganan untuk mengembangkan wibawa sistemik dan pelayanan publik.

Tipe kepemimpinan seperti itu memang tak selaras dengan tantangan demokratisasi. Demokrasi yang memuliakan kedaulatan rakyat menghendaki kepemimpinan yang “kuat”; yakni kepemimpinan berbasis hukum dengan menjalankan amanat konstitusi. Di sini, pemimpin negara mesti sadar bahwa demokrasi tak bisa dipisahkan dari konstitusi seperti tercermin dalam istilah “demokrasi konstitusional” (*constitutional democracy*). Istilah ini mengandung makna bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Dengan kepemimpinan yang committed terhadap konstitusi, ketaatan warga negara pada otoritas bukan sebagai ekspresi dari loyalitas dan ketakutan personal yang bersifat ad-hoc, melainkan sebagai ekspresi dari kesadaran hukum untuk kemaslahatan bersama yang bersifat permanen.

Dalam menjalankan demokrasi konstitusional tersebut, kepresidenan merupakan institusi yang sangat krusial. Sebagai satu-satunya pejabat negara yang dipilih langsung (secara teoritis) oleh seluruh rakyat, Presiden melambungkan harapan masyarakat

bahwa amanat konstitusi itu akan diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan dan dijalankan oleh administrasi pemerintahan secara rasional.

Komitmen utama konstitusi dan kepemimpinan negara berkhidmat pada upaya untuk mengamankan dan mencari keseimbangan dalam pemenuhan tiga pokok kemaslahatan publik (public goods). Hal ini berkisar pada persoalan legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif.

Basis legitimasi dari institusi-institusi demokrasi berangkat dari asumsi bahwa institusi-institusi tersebut merepresentasikan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat secara imparial. Klaim ini bisa dipenuhi jika segala keputusan politik yang diambil secara prinsip terbuka bagi proses-proses perdebatan publik (public deliberation) secara bebas, setara dan rasional. Hanya dengan penghormatan terhadap prosedur-prosedur public deliberation seperti itulah, peraturan dan keputusan yang diambil memiliki legitimasi demokratis yang mengikat semua warga, dan pemerintah bisa melaksanakannya secara benar (right) dan tanpa ragu (strong).

Kenyataan menunjukkan bahwa keputusan Presiden/Wakil Presiden acap kali tak sejalan dengan legitimasi demokratis. Adakalanya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan proses-proses public deliberation, seperti dalam kasus rencana revisi Undang-Undang Perburuan dan Pencabutan SP3 Suharto. Seringkali pula tak menjalankan kebijakan yang diamanatkan oleh hasil public deliberation, seperti dalam penetapan anggaran pendidikan dan dalam membiarkan aksi-aksi kekerasan terhadap kebebasan sipil dan politik.

Setelah basis legitimasi diperjuangkan, kemaslahatan publik selanjutnya adalah kesejahteraan ekonomi. Demokrasi politik tak bisa berjalan baik tanpa demokratisasi di bidang ekonomi. Pancasila sendiri mengisyaratkan, bahwa ujung pencapaian nilai-nilai ideal

kebangsaan harus bermuara pada "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Negara kesejahteraan menjadi pertarungan dari kesaktian Pancasila.

Dalam 9 tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan berarti dalam penciptaan masyarakat yang lebih transparan dan terbuka di bidang politik. Namun capaian-capaian ini seringkali dimentahkan oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi. Dalam hal ini, Joseph E. Stiglitz (2005) punya pandangan yang menarik.

"Di Indonesia orang kerap merasakan adanya konflik yang lebih intens: konflik antara kewajiban untuk bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam sebuah sistem yang didasarkan pada aturan, dengan kewajiban moral untuk membantu kerabat dan anggota komunitas di sebuah negara yang ditandai oleh tingginya angka pengangguran, kemiskinan akut, dan ketimpangan yang mencolok.

Ekonomi pasar hanya berjalan baik dalam sebuah sistem yang dipijakkan pada aturan. Dan dalam sistem yang berjalan mulus dengan kesempatan kerja penuh dan rasa keadilan sosial yang luas, kebutuhan untuk 'membantu' kerabat sangat bisa dikurangi. Masalahnya, mereka yang berada di negara berkembang diminta untuk meninggalkan 'jaring pengaman' dalam ikatan kekeluargaan dan komunal ini, padahal jaring pengaman sosial (dari rejim kesejahteraan) itu sendiri belum tercipta."

Menciptakan kesejahteraan ekonomi di negara seperti ini, Stiglitz merekomendasikan perlunya keseimbangan antara peran pemerintah dan pasar. Dalam hal ini, negara-negara berkembang harus lebih bebas dan leluasa menentukan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi mereka.

Tidak ada cara tunggal dan sistem yang sempurna, seperti yang sering dikhotbahkan oleh para arsitek ekonomi di World Bank dan IMF. Seturut dengan itu,

pemimpin negara harus memiliki keberanian untuk menjalankan amanat konstitusi dalam penguasaan bumi, air, udara dan kekayaan alam bagi kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara, sebagai mata-hati dan mata-nalar rakyat, harus berani mengambil sikap pro-rakyat dalam kasus eksplorasi kekayaan alam yang merugikan bangsa dan negara.

Semuanya itu merupakan prakondisi bagi terpeliharanya kebijakan ketiga: yakni identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia. Kemunculan Indonesia sebagai perwujudan dari civic nationalism (yang berbasis demokrasi konstitusional), dengan Pancasila sebagai titik-temu solidaritas kolektif-nya, mulai mendapatkan ancaman dari meruyaknya aspirasi politik identitas yang bersemangat partikularistik.

Fungsi pemimpin negara sebagai kekuatan moderasi di antara ekstrimitas masyarakat benar-benar sedang diuji. Betapapun mereka tampil karena dukungan partai atau kelompok tertentu, sekali mereka terpilih anasir-anasir partikularistik harus dikesampingkan demi kemaslahatan bersama.

Presiden/Wakil Presiden kerap kali terkesan melakukan endorsement secara sengaja atau tidak terhadap keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlalu mahal harganya, jika demi mobilisasi dukungan bagi pemilihan mendatang, hal-hal mendasar dari prinsip demokrasi konstitusional dikorbankan.

Krisis selalu mengandung dua sisi: ancaman dan peluang. Untuk memanfaatkan peluang di balik krisis ada kunci yang harus ditemukan. Adapun kuncinya adalah keteladanan kepemimpinan. Bagi para pemimpin, ada baiknya menyimak kembali credo Rene de Clerq yang menjadi semboyan Bung Hatta: "Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku. ◦"



LENSA AKTUAL

Selamatkan Pemerintah Jokowi-JK dari Menteri Antek Neolib

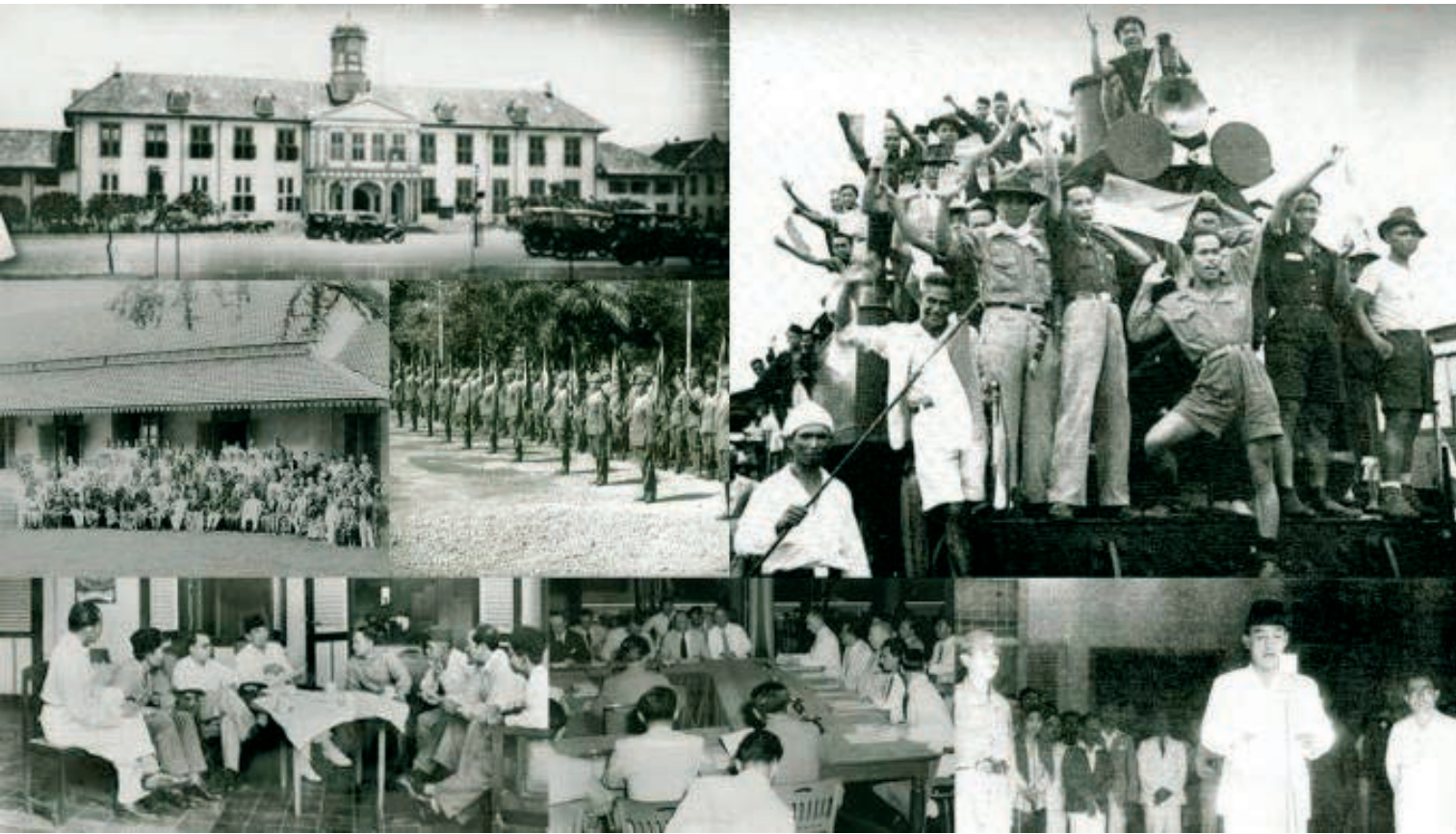
Empat aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggunakan topeng wajah Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said saat melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (11/1). Aktivis HMI menyerukan perombakan kabinet kerja untuk perubahan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia.

Aktual - Tino Oktaviano

apun lha yaa..
ng penting
report Aman

Bakal runyam nih
urusan Freeport
klo sampe gw
dicopot





Mengenang Komunitas Mahasiswa Prapatan-10, Menteng 31, dan Cikini 71

Siapa sangka, jika sebuah gedung yang berlokasi di jalan Prapatan No 10, yang terletak dekat pasar Senen pada Jalan kembar Prapatan Kwitang, pernah mengukir sejarah sebagai tempat penggemblengan para pemuda-mahasiswa yang membidani lahirnya para pemimpin bangsa yang kelak dikenal sebagai Angkatan 45. Para pemuda-mahasiswa inilah yang mendesak Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Para mahasiswa kelahiran dekade 2000-an yang hidup di era digital, android atau smart-phone, kiranya sulit membayangkan bahwa di Jakarta sekitar 1945, beberapa aktivis mahasiswa kedokteran Sekolah Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) dan Sekolah Perobatan (Yaku Gaku), pernah memainkan peran yang cukup penting dalam merintis terbukanya pintu gerbang menuju Kemerdekaan Nasional Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Masyarakat Prapatan 10/1945, merupakan sebuah komunitas pemuda dan mahasiswa yang sejatinya terdiri dari dua kelompok kecenderungan. Yang satu terhimpun dalam asrama Ika Daigaku, yang berpusat di Prapatan 10 dan yang satu lagi berkumpul di Baperpi (Badan Perwakilan Pelajar Indonesia) yang berpusat di Cikini 71. Namun para mahasiswa kedokteran Ika Daigaku inilah yang punya ikatan organisasi

yang solid dan jadi pendorong di kalangan pemuda-pemuda dan mahasiswa pada umumnya.

Yang unik dari mereka yang menamakan dirinya sebagai Masyarakat Prapatan 10/1945 itu, para anggotanya merasa terikat oleh suatu ideologi yang telah meresap di dalam kalbu masing-masing. Ideologi yang mereka anut itu disebut “Reine Jurgend Ideologie,” cita-cita Pemuda Murni, suatu ideologi tanpa pamrih, anti-kehdoliman terhadap rakyat, anti perongrongan material/moral terhadap rakyat, dan anti menginjak-injak hak asasi rakyat.

Inilah landasan ideologi para pemuda-mahasiswa Angkatan 45 yang kemudian membakar jiwa mereka yang mencapai kulminasinya saat runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda dan fasisme Jepang pada 1945. Bagi para pemuda-mahasiswa Prapatan 10/1945, Reine Jurgend Ideologie ini dipandang paralel dan senafas dengan Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahwa hanya melalui persatuan bangsalah kemerdekaan baru dapat diraih.

Sungguh suatu paham yang cukup inspiratif bagi para mahasiswa kita sekarang, yang notabene terkotak-kotak dalam berbagai organisasi ekstra maupun intra kampus dengan kepentingna kelompoknya masing-masing.

Para pemuda-mahasiswa kedokteran Ika Daigaku ini ditempatkan di sebuah asrama yang berlokasi di Prapatan 10, dekat Senen. Di sinilah para mahasiswa mengalami masa penggemblengan dalam suasana persatuan yang erat sekali. Tak heran jika para mahasiswa Ika Daigaku Prapatan 10 kemudian menjelma sebagai kesatuan ampuh yang punya kepercayaan teguh atas kemampuan diri sendiri untuk ikut serta menggerakkan roda revolusi, memelopori dan membakar semangat rakyat untuk berjuang.

Selama di asrama Prapatan 10 ini, mereka dibekali dengan ceramah-ceramah politik dan agama, selain memperoleh latihan-latihan fisik secara teratur oleh pemerintahan

kolonial Jepang.

Tak heran jika beberapa eksponen mahasiswa Prapatan 10 kemudian bergabung dalam Pasukan Pembela Tanah Air(PETA) ketika perang kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Karena sejak dini mereka memperoleh pelatihan dari Daidan PETA Jagamonytet, sebuah batalyon PETA terkemuka di Jakarta, dalam hal disiplin militer, kemahiran menggunakan senjata serta cara-cara melaksanakan dan memimpin pertempuran.

Kontak dengan para pemimpin pergerakan nasional dirajut melalui pendidikan dan kursus politik bagi mahasiswa yang tentunya diharapkan sebagai pemimpin-pemimpin masa depan. Para pengurus Asrama menghadirkan para pemimpin pergerakan nasional yang dari segi umur jauh lebih tua untuk memberikan wawasan politik seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sukarjo Wiryopranoto, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, dan lain-lain.

Rupanya karena ikatan batin yang terjalin melalui pendidikan dan kursus politik inilah, beberapa pemuda-mahasiswa Prapatan 10 ini pula yang merasa terdorong ikut memotori aksi mendesak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, menyusul informasi yang mereka peroleh pada 15 Agustus 1945 bahwa Jepang sudah menyatakan menyerah kalah terhadap tentara Sekutu. Sehingga para pemimpin mahasiswa, termasuk yang tergabung dalam Masyarakat Prapatan 10, bersama-sama berkumpul di Pegangsaan Timur No 17 menekan Bung Karno dan Bung Hatta agar secepat-lekasnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ketika terjadi vacuum of power menyusul menyerahnya Jepang terhadap sekutu.

Satu lagi, peran penting para pemuda-mahasiswa Prapatan 10 dalam masa peralihan menyusul Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan masa-masa konsolidasi nasional beberapa hari sesudahnya, mereka ikut serta dalam:

- Penyusunan dan pembinaan kelompok-kelompok pemuda rakyat seluruh kota Jakarta
- Pengambil-alihan gedung-gedung penting beserta peralatannya dan alat angkutan
- Aksi tulisan/corat-coret slogan-slogan di jalanan, tembok-tembok, angkutan umum dan lain sebagainya.
- Penyusunan Aparatur Negara, seperti Komite Nasional Indonesia Pusat dan Badan Keamanan Negara(cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia, TNI). Pemerintahan di Ibukota Jakarta
- Pengiriman kelompok-kelompok kecil ke berbagai penjuru Tanah Air baik di Jawa maupun Luar Jawa.
- Penyusunan organisasi pos-pos Palang Merah Indonesia di dalam maupun luar kota Jakarta, dan usaha-usaha lainnya.

Salah satu tokoh mahasiswa kedokteran yang tergabung di asrama Prapatan 10 yang cukup menonjol adalah Eri Sudewo, yang kelak di era pemerintahan Suharto pernah menjadi Rektor Universitas Airlangga Surabaya dan Duta Besar RI untuk Swedia. Dalam masa-masa genting ketika Indonesia dijajah Jepang, dalam susunan Pengurus Asrama Prapatan 10, Eri Sudewo memegang ketua biro kemahasiswaan. Posisi ini sangat strategis karena melalui Eri Sudeta inilah dalam memberikan arahan politik dan aksi perjuangan kemerdekaan tanah air.

Apalagi pada kenyataannya, para pimpinan asrama selain merupakan korps yang punya tugas mengelola hal ihwal asrama, pada perkembangannya kemudian jadi inti gerakan bawah tanah dalam menghadapi fasisme Jepang.

Hal ini terbukti munculnya gerakan-gerakan yang terkoordinir di kalangan mahasiswa dalam gerakan melawan Jepang, meskipun para mahasiswa kedokteran bertempat

tinggal terpencair di beberapa asrama seperti Cikini 71, di asrama putri dan yang di luar asrama.

Penggemblengan di asrama Daigaku dan Yakugaku adalah yang paling ketat, meskipun yang mengelola dan memimpin adalah para mahasiswa itu sendiri dan tidak ada pengawasan ataupun pembinaan dari pihak Jepang. Karena Jepang hanya melihat dari luar saja, mereka tidak menduga bahwa para mahasiswa betul-betul menaati ketentuan-ketentuan yang mereka buat, sebab para mahasiswa kelihatannya berdisiplin. Pihak Jepang tidak menduga mahasiswa di dalam asrama digembleng untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan nasional, yang kelak terbukti para eksponen Prapatan 10 menduduki posisi-posisi dan peran-peran strategis pasca proklamasi 17 Agustus 1945.

Ada sebuah cerita menarik. Suatu ketika, Bung Karno, berceramah dalam pertemuan dengan para pemimpin mahasiswa di Cikini 71 untuk memecahkan persoalan pemogokan para mahasiswa terhadap kebijakan fasisme Jepang yang memberlakukan pengundulan Mahasiswa. Dalam pertemuan itu, Bung Karno menghimbau para mahasiswa untuk menghentikan pemogokan dan kembali kuliah atas dasar pertimbangan strategi dan taktik perjuangan. Namun himbuan Bung Karno mendapat bantahan dari Sudarpo Sastrosatomo dan Sujatmoko. Meskipun akhirnya keduanya bisa memahami sikap Bung Karno.

Menariknya, ketika meninggalkan pertemuan di Cikini 71, Bung Karno sempat menyatakan bahwa Darpo dan Koko itu nanti akan menjadi "orang besar." Dan ternyata memang benar. Sudarpo kelak merupakan salah satu pengusaha sukses pribumi. Sedangkan Dr Sujatmoko kelak dikenal sebagai salah seorang cendekiawan Indonesia yang sempat menjadi rujukan para mahasiswa pada dekade 1960-an hingga 1980-an.

Nampaknya, para mahasiswa kedokteran Ika Daigaku Prapatan 10 dan Cikini 71, merupakan kelompok mahasiswa yang paling radikal dalam melawan sepak-terjang fasisme kolonial Jepang. Terbukti beberapa mahasiswa yang kemudian ditangkap oleh Polisi Militer Jepang (Kempeitai) sebagian besar merupakan mahasiswa kedokteran seperti: Sujatmoko, Sujono, Didi Jayadiningrat, Kurniawan, Wibowo, Mukiman, Sanyoto, Utaryo, Daan Yahya, Suwadi, Petit Muharto, Eri Sudewo, Purwoko, Tajuludin, Sayoko Sastrokarono, Karimudin, dan Suwito.

Penangkapan tersebut bukan saja akibat pembangkangan mahasiswa dalam latihan kemiliteran di lapangan Boxlaan (sekarang jalan Prambanan), tetapi juga adanya berita radio Australia yang ditangkap oleh penguasa Jepang, mengatakan para mahasiswa Indonesia akan mengadakan pemogokan lagi sebagai protes terhadap tindakan kejam penguasa Jepang.

Para mahasiswa Iga Daigaku inilah yang paling merasakan kekejaman tentara Jepang yang diterapkan di kampus mereka. Selain mengalami siksaan fisik, beberapa di antaranya setelah ditahan selama 20 hari, kemudian ada yang dipecat dan tidak boleh ikut kuliah lagi di Sekolah Tinggi Kedokteran. Seperti Sudarpo, Suroto, Subianto, Margono, Sujatmoko dan beberapa mahasiswa lainnya. Sedangkan Eri Sudewo, salah seorang pimpinan mahasiswa yang cukup menonjol serta beberapa mahasiswa lainnya di kalangan Prapatan-10, diskors selama satu tahun tidak boleh kuliah.

Namun sejarah nampaknya cukup adil bagi mereka kelak. Mengingat kenyataan bahwa kala itu tenaga dokter sangat dibutuhkan karena masih langka, maka Eri Sudewo dan sekitar 30 orang mahasiswa lainnya, dibolehkan menyandang gelar dokter tanpa ujian. Karena mereka ketika dikenakan skors oleh pihak Jepang, sudah menduduki tingkat akhir fakultas kedokteran.

Alhasil, Eri Sudewo dan 30 rekannya itu tercatat sebagai lulusan pertama Jakarta Iga Daigaku, yang kelak setelah Indonesia merdeka diambil-alih oleh pihak republik. Yang sekarang lebih kita kenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, di Salemba, Jakarta Pusat. Beberapa pengalaman buruk ini, tak heran jika para eksponen Prapatan-10 pada perkembangannya selain menaruh antipati yang besar kepada fasisme Jepang, sehingga secara garis politik lebih sehaluan dengan Sutan Sjahrir, yang kelak merupakan Perdana Menteri Indonesia Pertama, dibandingkan dengan Sukarno-Hatta yang cenderung lebih kooperatif menghadapi pemerintahan fasisme Jepang ketika itu.

Begitulah. Komunitas Mahasiswa Prapatan-10 merupakan salah satu dari kelompok pemuda-mahasiswa yang sangat aktif dalam persiapan jelang kemerdekaan Indonesia. Selain Kelompok Menteng 31, Cikini 71 dan Gang Bluntas.

Selain itu, rupanya di Asrama Mahasiswa Prapatan-10 ini pula, konsepsi dan gagasan bentuk negara Indonesia merdeka sempat digodok dan dibahas secara intensif oleh para pentolan pergerakan mahasiswa. Seperti apakah Indonesia merdeka kelak baiknya apa lebih pas dalam bentuk kerajaan, republik, dominion, atau negara kesatuan.

Dalam soal diplomasi pun, para pemuda-mahasiswa juga cukup piawai. Seperti misal dalam membangun kesepahaman dengan berbagai elemen pemuda lewat Sidang –sidang kongres maupun rapat-rapat umum. Sebelum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dibentuk, elemen-elemen pemuda sudah melakukan Kongres Pemuda se-Jawa yang menyerukan persiapan diri bagi pelaksanaan Proklamasi. Bersama pemuda Menteng 31, eksponen Prapatan itu melakukan serangkaian rapat gelap dan mencetuskan Gerakan Angkatan Baru Indonesia.

Jadi jelaslah sekarang bagi kita, bahwa rapat BPUPK maupun

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bermuara pada keputusan strategis 18 Agustus 1945, tidak datang ujug-ujug. Ada suatu kerja politik yang cukup lama. Melalui peran yang dimainkan oleh komunitas mahasiswa Prapatan-10 khususnya, maupun elemen-elemen pemuda-mahasiswa lainnya seperti Cikini 71, Menteng 31 dan Gang Bluntas pada umumnya, nampak jelas pemuda-mahasiswa ternyata memainkan peran yang sangat penting dalam merintis Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Pada 7 Juni 1945, sebagai ilustrasi, para pemuda-mahasiswa yang tergabung dalam Ika Daigaku, Yakugaku (Akademi Farmasi), dan Kenkoku Gakuin (Akademi Pemerintahan) menggelar rapat seluruh pemuda pelajar Sekolah menengah Tinggi untuk kemerdekaan Indonesia. Dan di sini lagi-lagi, terungkap betapa besarnya peran dan prakarsa pentolan-pentolan Prapatan-10. Atas dasar prakarsa para pentolan Prapatan-10 itu pula, rapat kemudian mengeluarkan tuntutan, selain “Indonesia Merdeka Sekarang Juga”, pula mendesak diadakan latihan militer sempurna bagi pemuda-pelajar.

Tak aneh jika beberapa pentolan Prapatan seperti Eri Sudewo, kelak selain punya reputasi sebagai dokter ahli bedah dan paru-paru, juga merupakan perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal.

Sujatmoko, jebolan Ika Daigaku yang sayangnya harus dipecat oleh Jepang sehingga gagal jadi dokter, namun kelak dikenal sebagai salah seorang intelektual Indonesia caliber internasional. Selain pernah jadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat di era pemerintahan Suharto, juga pernah menjadi Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, Jepang. Ironis bukan. Dipecat oleh Jepang sebagai mahasiswa, namun akhirnya menduduki posisi sangat terhormat di Jepang.

Sudarmo Sastrosatomo kelak merupakan pengusaha sukses

di bidang perkapalan baik di era Sukarno maupun Suharto. Sehingga tepatlah prediksi Bung Karno bahwa Sujatmoko dan Sudarmo kelak bakal jadi “orang besar.” Tentunya, di bidang dan bakat khususnya masing-masing. Dan uniknya, meskipun dalam perkembangan sejarahnya kemudian, Bung Karno berseteru dan bermusuhan dengan Sutan Sjahrir dan Partai Sosialis Indonesia, di mana Sujatmoko dan Sudarmo lebih segaris secara ideologis dengan Sjahrir dan PSI, namun Darpo dan Koko tetap menjalin hubungan pribadi yang baik dan akrab dengan Bung Karno. Bahkan melalui mediasi mereka berdua, komunikasi tak langsung antara Bung Karno dan Bung Sjahrir tetap terjalin.

Barang tentu, komunitas Prapatan-10 bukan satu-satunya elemen mahasiswa yang cukup menonjol semasa transisi dari pemerintahan Jepang menuju Indonesia merdeka. Selain Prapatan-10, ada juga kelompok pemuda yang tergabung dalam Asrama Angkatan Baru Indonesia, yang berpusat di Menteng 31. Mulanya, kelomok ini dibentuk oleh sejumlah pemuda yang bekerja pada bagian propaganda Jepang (Sendenbu). Secara resmi pendirian asrama ini dibiayai oleh Jepang dengan maksud menggembleng para pemuda untuk menjadi alat Jepang. Akan tetapi pada perkembangannya kemudian tempat ini oleh pemuda dimanfaatkan secara diam-diam untuk menggerakkan semangat nasionalisme dan persiapan menuju Indonesia merdeka.

Beberapa pentolannya adalah Ir Sakirman, DN Aidit, dan AM Hanafi. Mereka bertiga ini kelak dikenal sebagai pentolan-pentolan penting Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mereka ini mengorganisir Barisan Pelopor, termasuk tukang becak dan buruh kendaraan. Pada perkembangannya kemudian ketika Jepang mulai tanda-tanda akan kalah dari sekutu, kemudian membentuk Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom) dengan diketuai

oleh DN Aidit, MH Lukman dan Kertapati.

Mereka ini membentuk sel-sel kerja dan menjalin kontak dengan pemuda-pemuda dan golongan lain secara diam-diam. Di antara para pentolan Menteng 31 adalah Adam Malik (kelak Menteri Luar Negeri RI di era Suharto), Chairul Saleh (terakhir Wakil Perdana Menteri III di era Bung Karno), Subadio Sastrosatomo (kakak kandung Sudarmo yang merupakan pentolan Prapatan-10), dan BM Diah (kelak merupakan pemilik dan pemimpin redaksi Harian Merdeka).

Meski Aidit, Lukman dan Hanafi waktu itu sudah dipandang berhaluan komunis, namun pada prakteknya mereka ini tetap berkomitmen demi kepentingan nasional dan tidak eksklusif untuk kepentingan partai komunis. Apalagi waktu itu kan PKI belum ada. Fokus waktu itu, bagaimana agar secepatnya mengusir pemerintahan fasisme Jepang, dan secepatnya memproklamasikan Indonesia merdeka. Tak pelak lagi, baik komunitas Prapatan-10 maupun Menteng 31, hakikinya merupakan kelompok pendobrak.

Setelah menyerap kembali kisah mereka, saya jadi berpikir, jangan-jangan tanpa desakan dan tekanan para pemuda-mahasiswa ini agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta bakal dilanda keragu-raguan dan mungkin juga kekhawatiran, untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Yang tak kalah penting dalam memainkan peran merintis kemerdekaan Indonesia adalah Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia (BAPERPI). Salah satu pimpinannya yang menonjol adalah Supeno (kelak jadi Menteri Pemuda di masa awal Kemerdekaan), Burhanudin Harahap dan Kusnandar. Kelompok persatuan mahasiswa ini, seperti juga Prapatan-10 dan Menteng 31, sangat anti fasisme Jepang. Sehingga praktis BAPERPI dan Prapatan-10 pada perkembangannya lebih menganut garis politik Sutan Sjahrir. ♦ Hendrajit



Data Lengkap Korban Luka dan Meninggal “Tragedi Bom Sarinah”

Kamis (14/1) pagi, Jakarta dikejutkan dengan meledaknya bom di kawasan Sarinah, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kejadian naas tersebut diketahui ‘memakan’ banyak korban. Tak hanya itu, kejadian tersebut menimbulkan trauma bagi para karyawan atau pegawai yang berada di tempat kejadian.

Berikut data lengkap korban luka hingga meninggal dari tragedi “Bom Sarinah” yang dihimpun Aktual.com:

1. *Data korban sementara total 31 orang terdiri dari:*
 - a. Luka 24 orang
 - b. Meninggal dunia 7 orang.
2. *24 korban luka terdiri dari:*
 - a. 5 anggota Polri,
 - b. 4 warga negara asing (satu warga Belanda, satu orang warga Austria, satu warga Jerman, satu orang warga Aljazair) dan,
 - c. 15 warga sipil.

Dari tujuh meninggal dunia (diduga lima di antaranya pelaku) terdiri dari :

- a. 1 WNA dari Kanada
- b. 6 WNI

Adapun ke-31 korban luka-luka dan meninggal dunia tersebut saat ini berada di rumah sakit dengan rincian, sebagai berikut:

1. RSCM 4 korban : 1 anggota

- Polri dan 3 warga sipil
2. RS. Gatot Subroto 9 korban : 2 anggota Polri dan 5 warga sipil
3. RS Abdi Waluyo 6 Korban : 1 anggota Polri, 1 security Polda, 3 warga sipil dan 2 warga negara asing (Jerman dan Austria)
4. RS. Kramat Jati : 7 Korban (meninggal dunia) belum teridentifikasi masih proses otopsi
5. RS. Husada 1 : warga sipil
6. RS. Tarakan 1 : warga sipil
7. RS. MMC : 3 orang (sipil)

Nama-nama korban :

A. Di RS. Gatot Subroto

1. Aiptu Dodi Maryadi- anggota lintas (luka tembak di perut)
2. Aiptu Budiyo – anggota Provost Jakpus (luka tembak di perut)
3. Aiptu Budi Rachmat – anggota lintas (luka tembak di dada kiri)
4. Anggun Artiasari (luka kaki kanan)
5. Chairul (luka punggung kanan dan tangan kanan)
6. Yonahen Antonius Maria -WNA Belanda (luka tangan kiri patah dan tempurung kaki pecah)

7. Morat Armeswali – WNA Al Jazair (luka di dada kiri dan kaki kiri patah)
8. Agus Kurnia (luka pusing dikepala)
9. Permana (luka punggung kiri)

B. Di RSCM

1. Aiptu Deni – anggota lintas (luka di kaki)
2. Indah Puspita Sari (luka dikeneng sebelah kiri dan perut memar)
3. Mira Puspita (luka kaki kanan dan jilbab terbakar)
4. Venosia Dyah Mavianti (luka robek di kepala belakang)

C. Di RS Abdi Waluyo

1. Aiptu Suhadi – anggota lintas (luka tembak di punggung dua kali)
2. Rais – Security Starbucks (luka tembak di kepala)
3. Aldi Tardiansyah -security starbucks (luka serpihan di telinga)
4. Afrizal (luka serpihan di dahi dan siku kiri)
5. Stoifl -WNA Austria (luka robek pergelangan tangan kanan dan kiri)
6. Frank Feunen – WNA Jerman (luka robek di dahi dan leher)

1328 Anggota TNI Terjangkit HIV/AIDS



Sebanyak 1.328 anggota TNI terjangkit HIV/AIDS, dan hingga 30 Juni 2015 tercatat 343 orang di antaranya meninggal dunia.

Demikian disampaikan, Wakil Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang Kolonel Laut (P), Guntur Wahyudi, di Riau, Selasa (12/1).

"TNI sebagai subpopulasi dari penduduk Indonesia yang tidak terlepas dari permasalahan, seperti kasus HIV/AIDS di lingkungan TNI. Ini menjadi perhatian serius," kata dia.

Dia mengatakan, kasus HIV/AIDS di lingkungan TNI meningkat, dan karena bila tidak ditangani secara intensif dan menyeluruh dikhawatirkan berpengaruh terhadap kesiapan TNI dalam melaksanakan tugas operasi militer perang dan selain perang.

"Sebagai instansi pelayanan kesehatan di lingkungan Lantamal IV/Tanjungpinang wajib mengantisipasi permasalahan ini dengan melakukan kegiatan preventif berupa penyebaran informasi tentang HIV/AIDS, serta pencegahan penularan HIV dan penyakit menular seksual lainnya yang secara paralel juga meningkat jumlah kasusnya," ujarnya. Nebby

Pemberdayaan Pelra, Diperlukan Payung Hukum

Ketua Umum Pelayaran Rakyat (Pelra) H. Sudirman Abdullah mengatakan apa yang dilakukan pemerintah saat ini terhadap Pelayaran Rakyat masih belum maksimal.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah saat ini perlu memikirkan langkah lain, termasuk dengan mencari penyanggah dana yang bersedia berinvestasi pada usaha Pelayaran Rakyat.

"Tentu saja juga harus ada pengaturan yang ketat terkait dengan aturan main pinjaman tersebut. Pinjaman tersebut dalam bentuk pinjaman lunak," harap dia.

Selain itu, sambung Sudirman, dirinya berharap sebagai bentuk dari pemberdayaan kepada Pelra kedepan, pemerintah segera membuat payung hukum tersendiri bagi Pelra dalam bentuk Peraturan pemerintah, sebagaimana amanat dari UU Republik Indonesia

No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Rakyat, terutama Pasal 17 yang menyebutkan Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelayaran-Rakyat atau disingkat Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk Pinisi, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Pelayaran rakyat mengandung nilai-nilai budaya bangsa yang tidak hanya terdapat pada cara pengelolaan usaha serta pengelolanya misalnya mengenai hubungan kerja antara pemilik kapal dengan awak kapal, tetapi juga pada jenis dan bentuk kapal yang digunakan. Karel Stefanus Ratulangi

Pria Irak, Poligami Atau Dihukum Mati

Pemerintah Irak mengumumkan status negaranya dalam darurat perang. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Irak mewajibkan pria di Irak berpoligami.

Keputusan tersebut berdasarkan surat keputusan dari Perdana Menteri Irak Haidar Jawwad al

Abbadi bertanggal 6 Januari 2015.

Surat Keputusan itu ditujukan ke seluruh kantor kementerian wanita dan seluruh pihak terkait dengan kementerian.

Seperti dilansir *The Guardian*, Minggu (17/1) garis besar surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap laki-laki harus beristri paling tidak dengan 2 orang wanita.
2. Negara menjamin biaya-biaya pernikahan dan tempat tinggal.
3. Lelaki yang menolak melaksanakan keputusan ini, akan dihukum mati.
4. Wanita yang berusaha melarang suaminya untuk berpoligami, dihukum penjara seumur hidup dan suaminya boleh menikah dengan 4 orang wanita.
5. Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkan pada lembaran negara.



Pesan Khusus Megawati untuk Jokowi

Pidato Megawati di rakernas PDIP membuat wacana akan terjadinya *reshuffle* kabinet kerja semakin diyakini akan terjadi.

Kota Shenzhen, Tiongkok memberikan pelajaran berharga bagi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Kota yang saat ini maju pesat pembangunan dan industrinya itu dikunjungi oleh Mega tahu lalu. Ia terpesona dengan pembangunan dan infrastruktur yang amat cepat berkembang. Ditengah kekagumannya seorang pejabat Partai Komunis Tiongkok menegus Mega.

"Mega, kamu tidak perlu terpesona. Tahu apa yang kita lakukan? Ini adalah yang telah dilakukan bapak kamu, Bung Karno." Kenapa oleh Indonesia ditinggalkan?," kata Megawati menirukan ucapan tokoh partai komunis itu.

Ucapan sang pejabat membuat Megawati malu. Rasa malu yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendengarkan cerita disela pidato politik Megawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1).

"Makanya saya mau sembunyikan kepala. Malu saya, malu, Pak Jokowi. Dibilangin ini Bung Karno punya yang kami ambil," ujarnya.

Cerita kunjungan Megawati ke Tiongkok adalah sebagian dari keresahannya akan pembangunan nasional. Menurutny pembangunan nasional tidak berkesinambungan. Setiap rezim kekuasaan memiliki pola pembangunan yang berbeda sehingga menurutnya hal ini

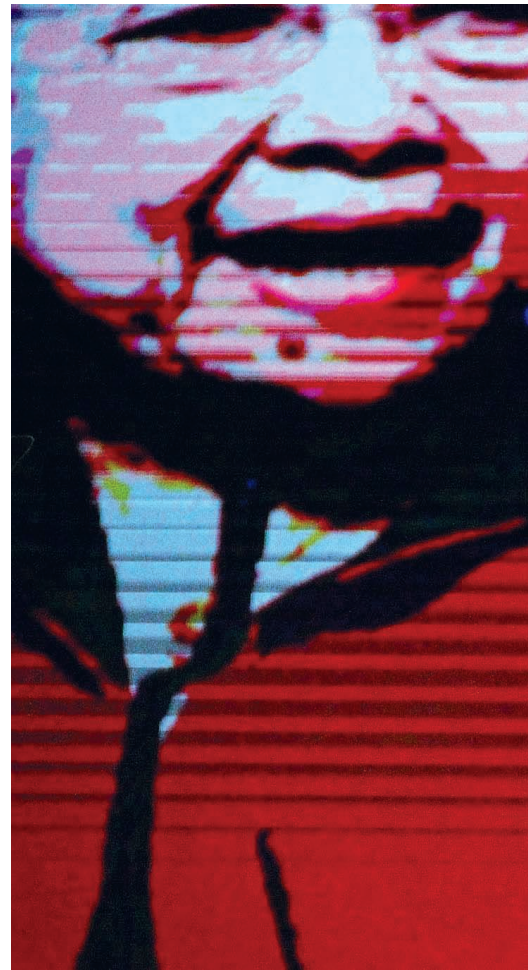
membuat pelambatan pembangunan.

Pembangunan nasional yang berkesinambungan tersebut dapat terwujud jika pemerintah dapat mengoptimalkan cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Disinilah kemudian Megawati menyoroti perang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Megawati menilai saat ini peran BUMN masih jauh dengan Nawacita dan Trisakti yang merupakan garis ideologis pemerintahan Jokowi-JK.

BUMN disebut Megawati sebagai pondasi pembangunan nasional yang menjadi alat negara untuk mensejahterakan rakyat. Namun Kementerian yang saat ini dipimpin oleh Menteri Rini Soemarno tersebut dinilai Megawati tidak dapat mengimplementasikan janji sesuai dengan amanat konstitusi.

"Tetapi berbeda dengan yang terjadi saat ini BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi semata yang hanya melakukan pendekatan bisnis semata atau yang sering didengarkan sebagai pendekatan bisnis to bisnis," ujarnya.

Megawati menambahkan alasan itulah yang membuat PDI-Perjuangan memberikan perhatian khusus kepada terbentuknya



hak angket Pansus Pelindo II.

"Ketika DPR memutuskan menggunakan hak dewan bukanya hak ibu Mega melalui pembentukan pansus angket pelindo II. Pansus ini diyakini sebagai sebuah pintu masuk untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi," tegasnya.

Pidato Megawati di rakernas membuat wacana akan terjadinya *reshuffle* kabinet kerja semakin diyakini akan terjadi. Demikian dikatakan oleh politisi PDI-P Effendi Simbolon. Menurutny pesan Megawati dalam pidato politiknya sudah sangat jelas ditujukan untuk Presiden Jokowi. Yakni mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Tidak perlu ditafsirkan lagi. Sudah pahamlah, bahwa jangan lagi (Rini Soemarno) diteruskan, harus *displace*, diganti," ujarnya, di



Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

sudah berada ditangan Presiden. Namun hingga kini pemerintah belum mengambil sikap terkait rekomendasi itu. Informasi yang dihimpun *Aktual reshuffle* kabinet kemungkinan akan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 14 Januari esok.

Menteri Rini kemungkinan besar akan tetap dipertahankan dalam struktur kabinet. Namun Rini tidak lagi di Kementerian BUMN ia akan menggantikan posisi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Perombakan kabinet juga akan memastikan posisi politik dua partai yang selama ini berada di Koalisi Merah Putih (KMP) yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar.

Siapa yang akan menggantikan Rini di pos Kementerian BUMN belum jelas. Diyakini politisi Partai PDI-Perjuangan akan mengisi posisi tersebut. Dari hasil survei Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei nasional, Senin (11/1). 50,3 persen responden menyatakan Presiden perlu merombak kabinetnya, 32,9 persen menyatakan tidak perlu dan sisanya tidak menjawab/tidak tahu.

Besaran keinginan publik terhadap perombakan kabinet ini disampaikan juru bicara Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengalami penurunan dibandingkan dengan 4 kali survei sebelumnya. Terakhir pada Oktober 2015 lalu, dimana Perlu reshuffle sebesar 55,8 persen, Tidak Perlu 37,5 persen dan sisanya tidak menjawab/tidak tahu.

Ada tiga menteri yang menurut hasil survei layak untuk dicopot.

“Tinggi dipertimbangkan (*reshuffle*): Darmin Nasution, Puan Maharani, Rini Soemarno, Luhut Binsar Panjaitan, Ignasius Jonan dan Imam Nachrowi,” jelas Hendri. ◻

Wahyu Romadhony

Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).

Effendi menambahkan pesan Megawati kepada pemerintah harus dijalankan untuk memperbaiki kinerja.

“Rini Soemarno, Sudirman Said, sama semua kroni-kroni rumah transisilah. Itu kan kroni-kroni Rini semua. Untuk perbaikan Pak Jokowi, bahkan bisa dua periode beliau-kan. Kenapa enggak? Saya kritik beliau (Mega)

juga dalam rangka untuk memberi manfaat kepada Jokowi,” ujarnya.

PDI-P memang memiliki perhatian khusus pada Kementerian BUMN selama pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Akhir tahun

lalu misalnya dalam Pansus Pelindo II yang dipimpin oleh politisi PDI-Perjuangan Rieke Diah Pitaloka sorotan tajam diarahkan pada Menteri Rini.

Bahkan dalam hasil laporan tahap pertama Pansus Pelindo II yang disahkan dalam rapat paripurna merekomendasikan pada Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Rini.

“Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden RI

untuk menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan, Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN,” demikian disampaikan oleh Rieke kesimpulan tahap pertama Pansus Pelindo II.

Saat ini rekomendasi tersebut

Megawati menilai saat ini peran BUMN masih jauh dengan Nawacita dan Trisakti yang merupakan garis ideologis pemerintahan Jokowi-JK

Perselisihan BIN dan Polri

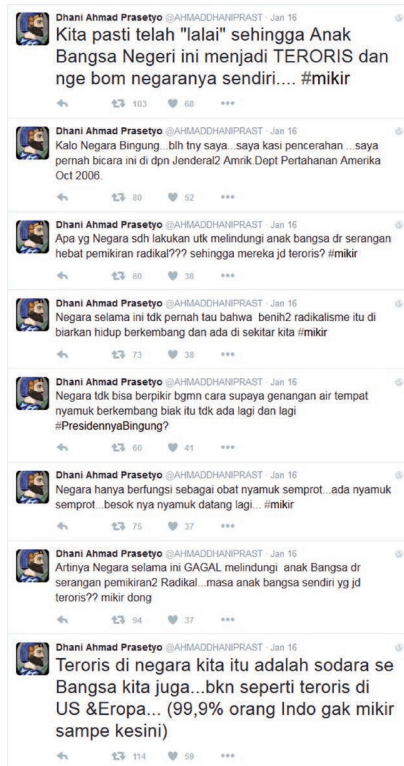
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso meminta agar BIN diberi kewenangan menangkap dan menahan teroris.

Menurut dia, teroris sulit ditangkap akibat keterbatasan wewenang BIN dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Terorisme. Bahkan Polri yang punya kewenangan menangkap dan menahan juga punya keterbatasan juga. "Pelatihan teroris yang disampaikan BIN tapi tidak bisa ditindaklanjuti karena alat bukti dinilai kurang memadai," kata di Jakarta (15/1).

Pernyataan itu dikomentari Kapolri Badrodin Haiti. "Mana ada BIN bisa menangkap? Mana ada di dunia ini BIN bisa menangkap," kata Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jakarta (16/1).

Dia mempertanyakan dasar dan alasan Ketua BIN itu. "Tanya saja rujukannya dari mana. Yang namanya permintaan seperti itu kan harus ada naskah akademiknya," tambahnya.

Personel musik Dewa Ahmad Dhani, dalam sebuah *tweet*-nya



mengingatkan kembali soal akar masalah polemik antara BIN dan Polri soal terorisme. Bahwa pencegahan lebih penting daripada eksekusi. Demikian cuplikan beberapa *tweet* Ahmad Dhani di akun

@AHMADDHANIPRAST (16/1).

"Kita pasti telah 'lalai' sehingga Anak Bangsa Negeri ini menjadi TERORIS dan nge bom negaranya sendiri.... #mikir"

103 retweets 67 likes

"Apa yg Negara sdh lakukan utk melindungi anak bangsa dr serangan hebat pemikiran radikal??? sehingga mereka jd teroris? #mikir"

"Negara selama ini tdk pernah tau bahwa benih2 radikalisme itu di biarkan hidup berkembang dan ada di sekitar kita #mikir"

"Negara tdk bisa berpikir bgmn cara supaya genangan air tempat nyamuk berkembang biak itu tdk ada lagi dan lagi #PresidennyaBingung?"

"Negara hanya berfungsi sebagai obat nyamuk semprot...ada nyamuk semprot...besok nya nyamuk datang lagi... #mikir"

"Artinya Negara selama ini GAGAL melindungi anak Bangsa dr serangan pemikiran2 Radikal...masa anak bangsa sendiri yg jd teroris?? mikir dong"

"Teroris di negara kita itu adalah sodara se Bangsa kita juga...bkn seperti teroris di US & Eropa... (99,9% orang Indo gak mikir sampe kesini)"

Soemitro

Megawati: Kontrak Freeport Harus Ditinjau Ulang



Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendesak pemerintah agar Kontrak karya yang tidak memberikan kontribusi maksimal untuk kesejahteraan rakyat, untuk ditinjau ulang. Hal itu harus dilakukan karena selain untuk menjalankan amanat konstitusi sesuai pasal 33 UUD 1945, juga untuk menyelamatkan kekayaan negara.

"Penjabaran pasal 33 UUD 1945 sebagaimana terlihat dalam arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, telah memastikan tentang prinsip daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia," tegas Megawati dalam pidato Rakernas PDIP, di Jakarta, Minggu (10/1).

Kontrak-kontrak yang tidak memberikan kontribusi maksimal

untuk kesejahteraan rakyat, harus ditinjau ulang.

Megawati di hadapan Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Kontrak Karya PT Freeport Indonesia sudah semestinya ditinjau ulang Pemerintah Indonesia. Karena sejak beroperasi di Tanah Papua tahun 1967, royalty yang diberikan sangat minim sekali yakni cuma 1 persen.

"Contohnya yang paling heboh akhir-akhir ini adalah PT Freeport," sebutnya.

Sebagai informasi Kontrak Freeport direncanakan akan direnegosiasi ulang pada 2019 mendatang.

Freeport yang mengelola tambang emas di Papua yang merupakan tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia itu, hanya menyisihkan 1 persen keuntungannya untuk royalty Indonesia. *Arbie Marwan*

Prabowo: Demokrasi Tanpa 'Check and Balance' Bahaya!



Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa dalam negara demokrasi diperlukan pihak yang berada di luar pemerintahan.

“Yang kita lihat tak cocok harus kita kritisi. Ini namanya check and balance. Kalau demokrasi, tanpa ada namanya check and balance itu bukan demokrasi. Itu berbahaya malah, karena tidak ada yang menjaga dan mengingatkan,” kata Prabowo, di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1).

Prabowo menjelaskan bahwa selama ini dirinya selalu menjalin hubungan dengan partai-partai yang berada di Koalisi Merah Putih (KMP).

“Kita terus berkomunikasi, ketemu temen-temen dari teman PKS, kemarin kita ketemu Pak Aburizal Bakrie, dan juga kita selalu menunjukkan sikap kita ingin kerjasama dengan Pemerintah,” katanya.

Diketahui, PAN yang pada pilpres 2014 lalu berada di KMP, berbalik mendukung koalisi pemerintah. Kini, Golkar dan PKS juga dikabarkan sudah mulai merapat ke koalisi partai pendukung pemerintah. *Karel Stefanus Ratulangi*

Polri Berlakukan Status Siaga Satu ke Seluruh Indonesia



Mabes Polri telah berlakukan status siaga satu ke seluruh wilayah Indonesia sejak pukul 05.00 WIB sore tadi.

“Siaga satu diberlakukan diseluruh Indonesia,” ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/1).

Anton menjelaskan, pemberlakuan siaga satu ini untuk meningkatkan kesiagaan dan keamanan terutama di tempat-tempat yang dianggap sebagai sasaran teror.

“Seperti kantor polisi, pemerintahan, objek asing (dubes). Pengamanan akan dimaksimalkan,”

kata dia.

Dengan pemberlakuan siaga satu ini, jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk menyiagakan personel dan meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman teror. Sebab aksi teror tak dapat terprediksi baik tempat maupun waktunya.

“Tempat persembunyian teroris tidak hanya di Jawa. Mohon masyarakat memberikan informasi peduli terhadap lingkungan,” katanya.

Selain itu, kata Anton, dalam siaga satu ini seluruh anggota kepolisian di manapun berada diwajibkan mengenakan pakaian dinas lapangan.

“Hal ini dilakukan kepolisian sebagai tanda kesiagaan aparat keamanan mengantisipasi kemungkinan ancaman-ancaman teror. Negara jangan tunduk teroris,” terangnya.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menerapkan siaga satu di ibu kota DKI Jakarta. Siaga satu diberlakukan setelah meletusnya aksi teror di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. *Nebby*



PERKETAT KEAMANAN POLDASUMSEL. Anggota Gegana Brimob Polda Sumsel memeriksa mobil pengunjung yang hendak memasuki halaman Mapolda Sumatera Selatan, Palembang, Sumsel, Jumat (15/1).

MENGEKSPLORASI LISTRIK DARI SINAR MATAHARI

Pemerintah harus segera memperbesar pemanfaatan energi baru terbarukan, karena energi fosil tidak akan bertahan lama. Salah satu alternatif itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Langkah baru telah dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo dalam masalah energi baru terbarukan. Pemerintah merencanakan membentuk badan usaha khusus energi baru terbarukan, untuk mempercepat pengembangan energi nonfosil. Pemerintah juga segera membentuk badan pengelola dana ketahanan energi serta perbaikan regulasi sektor energi baru terbarukan.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada 7 Januari 2016 menyatakan, pembentukan BUMN khusus energi baru terbarukan itu merupakan terobosan untuk mempercepat pencapaian target dalam bauran energi. Berdasarkan kebijakan energi nasional, bauran energi pada 2025 untuk sektor energi baru terbarukan setidaknya 23 persen. PLN khusus energi baru terbarukan ini diharapkan dapat menjembatani keterbatasan anggaran PLN dalam pengembangan energi di sektor hulu.

Dalam hal pengembangan energi baru terbarukan, salah satu sektor yang layak dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya (sinar matahari) menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan sel surya (*photovoltaic*) dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya.

Photovoltaic mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Sedangkan pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin, dikombinasikan

dengan sistem pelacak, untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor.

Sistem pemusatan energi surya (*concentrated solar power*, CSP) menggunakan lensa atau cermin dan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari dari luasan area tertentu ke satu titik. Panas yang terkonsentrasikan lalu digunakan sebagai sumber panas untuk pembangkitan listrik biasa, yang memanfaatkan panas untuk menggerakkan generator. Sistem cermin parabola, lensa reflektor, dan menara surya adalah teknologi yang paling banyak digunakan. Fluida kerja yang dipanaskan bisa digunakan untuk menggerakkan generator atau menjadi media penyimpan panas.

Sedangkan sel surya atau sel *photovoltaic* adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. PLTS tipe *photovoltaic* menggunakan perbedaan tegangan akibat efek fotoelektrik untuk menghasilkan listrik. Solar panel terdiri dari tiga lapisan, lapisan panel P di bagian atas, lapisan pembatas di tengah, dan lapisan panel N di bagian bawah. Sinar matahari menyebabkan elektron di lapisan panel P terlepas, sehingga menyebabkan proton mengalir ke lapisan panel N di bagian bawah, dan perpindahan arus proton ini adalah arus listrik.

Tidak Menimbulkan Polusi

Salah satu keunggulan PLTS adalah ia tidak menimbulkan polusi



atau pencemaran lingkungan. Ini berbeda dengan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang menghasilkan pencemaran. Sumber energinya adalah sinar matahari, yang tersedia berlimpah di negara beriklim tropis seperti di Indonesia. Ia juga cocok untuk penggunaan di pulau-pulau terpencil, yang jauh atau tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN.

PLTS semacam ini bersifat mandiri (*independen*) karena menghasilkan listrik sendiri dan tidak terhubung pada jaringan PLN. Wilayah Indonesia yang sudah menggunakan PLTS adalah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa Barat, dan Yogyakarta. PLN bahkan sudah punya program “100 Pulau dengan 100% Tenaga Surya.”

Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 4,8 KWh/m² atau setara 112.000 GWp, sepuluh kali lipat dari potensi Jerman dan Eropa. Indonesia baru memanfaatkan sekitar 10 MWp. Untungnya, pemerintah telah mengeluarkan *roadmap* pemanfaatan energi surya yang menargetkan



Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said (kiri) dan Direktur PT. Len Industri (Persero) Ahrraham Mose (kanan), saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan di desa Oelpuah Kabupaten Kupang, NTT, Minggu (27/12).

kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 mencapai sebesar 0,87 GW atau sekitar 50 MWp/tahun. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar dalam pengembangan energi surya pada masa datang.

Presiden Jokowi telah meresmikan *Independent Power Producer* PLTS berkapasitas 5 Megawatt, di Desa Oelpuah, Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 27 Desember 2015. PLTS ini merupakan yang terbesar di Indonesia, dengan nilai investasi 1,2 juta dollar AS. Pengerjaannya dilakukan oleh PT LEN Industri (Persero).

PLTS ini dibangun untuk mengatasi masalah listrik di NTT. Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan, NTT masih mengalami defisit listrik sebesar 40 persen. "Kekurangan daya listrik bisa teratasi dengan PLTS ini," katanya.

Kementerian ESDM telah mencanangkan program pembangunan PLTS berkapasitas 5 ribu Megawatt (MW). Menurut

rencana, program ini akan diluncurkan dalam ajang Bali Clean Energy Forum, di Bali pada 11-12 Februari 2016.

Meski pengembangan PLTS telah memiliki basis yang cukup kuat dari aspek kebijakan, namun pada tahap implementasi, potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Secara teknologi, industri *photovoltaic* di Indonesia baru mampu melakukan pada tahap hilir—memproduksi modul surya dan mengintegrasikannya menjadi PLTS, sementara sel suryanya masih impor. Padahal sel surya adalah komponen utama dan yang paling mahal dalam sistem PLTS.

Harga yang masih tinggi menjadi isu penting dalam perkembangan industri sel surya. Berbagai teknologi pembuatan sel surya terus diteliti dan dikembangkan dalam rangka upaya penurunan harga produksi sel surya, agar mampu bersaing dengan sumber energi lain.

Memaksimalkan Dana Non-APBN

Ketua Tim percepatan Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, William Sabandar, menjelaskan pasokan listrik yang berasal dari energi surya itu akan dibangun selama lima tahun ke depan. Namun, William belum memerinci daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan. Adapun biayanya diperkirakan mencapai 7 miliar dollar AS.

William menambahkan, pendanaan itu akan memaksimalkan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melibatkan institusi non-perbankan. "Nanti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memfasilitasi bagaimana sektor energi bisa dibiayai. Jadi ada kerjasama Kementerian ESDM dan OJK," ujarnya.

Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan ambisinya, menjadikan Indonesia sebagai inisiator penggunaan energi bersih di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Sektor energi harus dibangun dari tiga pertimbangan: Pertama, aspek legal atau konstitusi. Kedua, mengenai platform pemanfaatan energi (fossil) yang makin lama makin habis. Serta aspek ketiga, mengenai kolaborasi global. "Maka dari itu, kita ingin membuka dialog yang mendorong adanya reform atau aliansi dalam tiga hal tadi," tutur Sudirman.

Membangun PLTS bukanlah sekadar masalah teknologi, tetapi banyak hal penting yang terkait. Pembentukan BUMN khusus energi baru terbarukan harus didukung kebijakan, pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia, apabila BUMN khusus ini betul-betul dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Sudirman menyebutkan, PLN perlu diwajibkan membeli tenaga listrik dari energi baru terbarukan. Hal itu akan dituangkan dalam peraturan presiden tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Sudirman juga menyatakan perlunya membentuk badan usaha—yang cenderung sebagai anak usaha PLN—yang khusus membeli energi baru terbarukan.

Hal ini mendapat kritik dari Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Fabby berpendapat, badan usaha khusus tersebut harus memiliki kemampuan finansial. "Nantinya badan usaha khusus itu akan berkontrak dengan PLN dalam hal jual-beli tenaga listrik. Ada potensi inefisiensi sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi," ujarnya.

Sebagai solusi mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, pemerintah perlu memperjelas regulasi terkait pembiayaan dan insentif, serta harga jual energi baru terbarukan. "Hal ini sangat penting bagi investor untuk memberi kepastian berinvestasi," tegas Fabby. ♦ Satrio Arismundandar

EVO MORALES, INSPIRASI DARI AMERIKA LATIN MELAWAN SKEMA EKONOMI KONSENSUS WASHINGTON

Ketika terpilih menjadi presiden Bolivia pada 2005, **Morales** seketika itu juga tahu bahwa akar keterpurukan ekonomi Bolivia berakar dari kemauan para elit politik pendahulunya menuruti permintaan IMF, Bank Dunia, Wall Street dan Washington.

Dunia internasional, dengan dimotori oleh Amerika Serikat di era pemerintahan Ronald Reagan pada awal 1980-an, menemukan momentumnya untuk menerapkan skema ekonomi neoliberalisme secara meluas, termasuk di Indonesia. Menyusul terjadinya krisis moneter secara luas di Amerika Latin, Departemen Keuangan AS bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang sekarang kita kenal sebagai Washington Consensus.

Adapun inti Paket Kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian *structural* IMF tersebut adalah pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, dan pelaksanaan privatisasi BUMN.

Paket Konsensus Washington ini kemudian dikembangkan secara lebih konkret melalui mekanisme *Structural Adjustment Program* (SAP) atau Program Penyesuaian Struktural dengan langkah-langkah sebagai berikut, pembukaan keran impor sebebaskan-bebasnya dan adanya aliran uang yang bebas, devaluasi, kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga kebutuhan pokok.

Bagaimana paket yang kemudian dikembangkan melalui mekanisme

Structural Adjustment Program (SAP) ini diterapkan secara sistemik dan terencana di beberapa negara? Adakah sebuah kontra skema untuk melawan hal itu? John Perkins, mantan bandit ekonomi asal AS yang belakangan tobat, punya cerita menarik dalam kasus di Bolivia.

Menurut penuturan Perkins, seperti halnya Indonesia di era pemerintahan Suharto pada 1980-an, Bolivia juga cenderung menerapkan program SAP ini sehingga seluruh sumber daya alam Bolivia tergadai kepada korporasi-korporasi asing. Bahkan pada 1970-an, Perkins menyimpulkan bahwa Bolivia sudah siap untuk melakukan privatisasi BUMN-nya seperti titah Konsensus Washington. Para pebisnis dan politisi melelang sektor-sektor perekonomian penting ke investor asing, yang diawali oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.

Tak ubahnya seperti menggadaikan kemerdekaan bangsa, mekanisme SAP ini, warga masyarakat Bolivia sepertinya dikondisikan untuk bagaimana mendapat uang banyak tetapi tidak perlu kerja keras. Dengan melegakan BUMN-BUM-nya pada asing, terutama di sektor pertambangan, para pebisnis dan politisi bisa lepas tanggungjawab untuk menggali dana melalui penarikan pajak

Presiden Bolivia Evo Morales (kanan), dan Wakil Presiden Alvaro Garcia Linera melambaikan tangan dari balkon Quemado Palace setelah dilantik sebagai Presiden Bolivia di La Paz, Januari 2006.





pasar modal dan rekening bank untuk mengembangkan fasilitas air, pembuangan, listrik, jaringan transportasi dan komunikasi, bahkan pendidikan dan penegakan hukum.

Dengan melego semua BUMN asing, para elit politik maupun pebisnis Bolivia, cukup puas dengan mengenyam pendidikan di AS secara cuma-cuma dan mendapat kesempatan magang di perusahaan teknik dan industri asing yang paling bergengsi. Sebaliknya, sebagai imbalannya, para elit politik Bolivia dengan senang hati memberi insentif pajak pada investor asing dan melonggarkan restriksi perdagangan impor AS maupun korporasi-korporasi asing lainnya, sekaligus menerima restriksi yang dikenakan oleh AS kepada Bolivia. Dengan kata lain, inilah kolonialisme gaya baru yang dirumuskan dalam bahasa IMF yang berbunga-bunga, seperti pemerintahan yang baik, ekonomi yang sehat, dan penyesuaian struktural.

Begitu pemerintah Bolivia meluluskan Undang-Undang yang mengizinkan usaha gabungan untuk menarik modal asing, dan menghapus restriksi konversi mata uang, lima perusahaan besar milik negara kemudian diprivatisasi/di-swastanisasi. Malah lebih jauh lagi, pada 1990 pemerintah mengumumkan rencana untuk menjual 150 perusahaan milik negara kepada investor asing.

Nah sampai di sini, sampailah kita pada cerita soal Listrik. Pada 1990, Perkins dihubungi oleh sebuah perusahaan AS, Leucadia National Corporation, menawarkan jabatan sebagai Presiden pada sebuah cabang perusahaan milik mereka. Namanya Perusahaan Listrik Bolivia (Compania Boliviana de Energia ElektriKA-COBEE, dalam bahasa Spanyol). Leucadia punya reputasi membeli perusahaan-perusahaan bermasalah dan mengubahnya jadi pusat untuk mendulang keuntungan.

Leucadia menjadi terkenal pada 2004, saat ia meminta penghapusan proteksi untuk membeli lebih dari 50 persen saham MCI Inc, jasa kurir jarak



jauh nomor dua di negara tersebut.

Perkins setuju dengan tawaran Leucadia. Melalui kiprahnya di Perusahaan Listrik Bolivia itulah, Perkins jadi ngerti bahwa reformasi demokrasi yang melanda Amerika Latin 1980-an, sejatinya malah jadi pintu masuk skema ekonomi neoliberalisme merembesi pemerintahan maupun Para Politisi

Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap pemerintahan baru terpilih dan menghadapi para pakar IMF dan Bank Dunia, mereka pada umumnya terbujuk untuk menjalankan SAP sebagai solusi ekonomi. Mulai dari Privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara hingga pemotongan bantuan-bantuan sosial bagi rakyat miskin. Sebagai imbalannya,

pemerintah menerima sejumlah pinjaman yang luarbiasa besar untuk mengembangkan proyek infrastruktur yang tidak jarang hanya melayani kelas atas sambil tetap membebani negara dengan utang.

Hasilnya adalah bencana geopolitik bagi Bolivia. Indikator-indikator ekonomi merosot tajam. Jutaan orang yang dulunya



Presiden Venezuela Hugo Chavez berbicara kepada wartawan setibanya ke Hotel Ritz di La Paz, Bolivia pada Sabtu, 21 Januari 2006.

dalam bisnis lokal.

Bedanya dengan di Indonesia pasca reformasi, penerapan SAP yang menyengsarakan rakyat itu, akhirnya justru mengundang gelombang baru kebencian kepada korporatokrasi dan para kolaboratornya yang korup dan semakin menjalar di benua Amerika Latin.

Dan melalui gelombang baru kebencian terhadap korporatokrasi itu, muncullah satu orang yang tak terduga, Evo Morales. Seorang anggota kongres, dan kemudian mencalonkan diri sebagai Presiden Bolivia. Tipologi seorang visioner sekaligus aktivis. Sehingga jadi tumpuan harapan bagi Bolivia dan menginspirasi negara-negara sekitarnya di Amerika Latin.

Begitu Morales jadi berhasil memenangi kursi kepresidenan pada 2005, seketika itu juga dia tahu bahwa akar keterpurukan ekonomi Bolivia berakar dari kemauan para elit politik pendahulunya menuruti permintaan IMF, Bank Dunia, Wall Street dan Washington.

Bagi banyak warga Amerika Latin, Evo Morales merupakan simbol anti korporatokrasi, pro pribumi, gerakan rakyat pro miskin. Begitu Desember 2005 jadi presiden, ia mengumumkan memotong gajinya hingga tinggal separuh, menyatakan tak ada menteri kabinet yang mendapat gaji lebih tinggi darinya, dan mengalokasikan yang yang disisihkan itu untuk mengangkat lebih banyak guru sekolah negeri.

Wapresnya, Alvaro Garcia Linera, pernah menjadi pemimpin gerilya dalam gerakan revolusioner anti korporasi Bolivia. Ia menghabiskan empat tahun hidupnya dalam penjara menempuh pendidikan sebagai ahli matematika di Meksiko, kemudian jadi professor sosiologi di universitas Mayor de San Andres, La Paz. Lebih menakjubkan lagi, menteri kehakimannya, seorang perempuan, pernah bekerja sebagai pembantu

rumah tangga. Adapun pemimpin senatnya, adalah seorang guru sekolah desa.

Pada Mei 2006, Presiden Morales memerintahkan militer Bolivia menduduki ladang-ladang minyak dan gas di seluruh negeri, dan menempatkannya di bawah kendali negara. Dengan memberi waktu 180 hari kepada para eksekutif perusahaan untuk menegosiasikan kembali kontrak-kontrak dengan pemerintah, ia menyatakan: “Perampasan oleh perusahaan-perusahaan asing telah berakhir.

Bukannya membagi profit dengan rasio kasar 80 persen untuk korporasi asin dan 20 persen untuk Bolivia, ia mengatakan akan membagi dengan proporsi terbalik.

Langkah Morales itu mendapat dukungan dari Hugo Chavez, Presiden Venezuela yang sudah lebih dulu memenangi kursi kepresidenan pada 1998. “Kami mendukung Bolivia yang bercita-cita sama dengan Venezuela. Kami telah menguasai kembali sumber-daya alam dan kekayaan mineral kami melalui proses yang sangat panjang dan sulit, yang bahkan membuat kami mengalami upaya kudeta. Di Bolivia aku yakin bahwa segalanya akan menjadi baik,” begitu tegas mantan kolonel yang sempat melancarkan percobaan kudeta tapi gagal terhadap Presiden Perez pada 1992 itu.

Morales, sedari awal memang sudah mencanangkan perang terhadap eksploitasi korporat asing, tak peduli di manapun markasnya:

“Kami akan membela sumberdaya alam. Jika sebelumnya Bolivia itu bukan negeri siapa-siapa, sekarang ia jadi negeri seseorang. Ia adalah negeri orang-orang Bolivia, khususnya penduduk asli dan pribuminya. Perusahaan swasta, perusahaan minyak, perusahaan transnasional, jika ingin datang kemari dan bersedia menghormati hukum Bolivia, mereka akan disambut baik, tapi jika tidak bersedia menundukkan diri kepada negara Bolivia, hukum negara ini, celakalah mereka.” ● Hendrajit

merupakan kelas menengah, kini telah kehilangan pekerjaan dan bergabung bersama orang yang melarat.

Ketika penduduk menyaksikan merosotnya dana pensiun, perawatan kesehatan dan lembaga-lembaga pendidikan, mereka juga melihat para politisi getol membeli saham real estat Florida ketimbang berinvestasi



MAFIA DAN GEOPOLITIK ENERGI BARU TERBARUKAN

Ketika terpilih menjadi presiden Bolivia pada 2005, **Morales** seketika itu juga tahu bahwa akar keterpurukan ekonomi Bolivia berakar dari kemauan para elit politik pendahulunya menuruti permintaan IMF, Bank Dunia, Wall Street dan Washington.

A adalah Vito Nicastrì. Dia dijuluki “*The Lord of The Wind*” di negara asalnya, Italia. Ya, pria berumur 57 tahun ini adalah salah satu pengusaha besar Italia yang bergerak di industri energi baru terbarukan (*renewable energy*).

Namun sebutan itu berubah menjadi “*The Lord of The Wind Mafia*” ketika dalam sebuah kesempatan, polisi anti mafia di Italia (*Italian Anti-Mafia Police*)

menangkap pengusaha gaek ini. Vito terbukti melakukan cuci uang hasil kejahatan ‘*Godfather*’ kelompok mafia Cosa Nostra dari Sicilia, Matteo Messina Denaro. Vito adalah kaki tangan kelompok mafia pimpinan Matteo di bisnis energi baru terbarukan di Italia.

Yang menarik dari kasus ini adalah ketika polisi Italia membekukan beberapa aset dan proyek Vito sebesar USD1,7 miliar.



Aset itu terdiri dari 43 perusahaan energi angin dan energi solar (panas matahari) dan 66 rekening bank yang dimilikinya. “*The Cosa Nostra is adapting, acquiring more advanced knowledge in new areas like renewable energy that have become more profitable because of government subsidies,*” kata Deputy Prosecutor in Charge of Palermo’s Anti-Mafia Squad, Teresa Maria Principato kepada Washington Post.

Pernyataan Teresa tersebut diperkuat Jen Alic, analis geopolitik *OilPrice.com*. Bahwa telah terjadi kongkalikong antara mafia dengan oknum petinggi di Italia untuk memanfaatkan subsidi pemerintah dan masih lemahnya hukum di industri energi baru terbarukan di Italia.

Jen Alic yang juga Pemimpin Redaksi ISN Security Watch di



Zurich menulis di kolom OilPrice.com seperti ini: *“That’s easy: lucrative government subsidies for the construction of wind farms and a fairly lax regulatory system. Geography has also played a role: The wind farms are largely in the country’s south where the Mafia enjoys a strong presence and where they control much of the land. These farms—and other subsidized renewable energy projects—are convenient venues for laundering money”*.

Penulis buku *“The Wind Farm Scam”*, Professor John Etherington dari University of Wales bahkan mengatakan kepada The Telegraph seperti ini: *“...the wind industry is very fragile, opaque and vulnerable to corruption and crime because of lack of regulation not only in European countries, but outside that*

region as well”.

Perlu diketahui, diantara negara-negara lain di Eropa, Italia adalah negara yang paling ambisius mempercepat terlaksananya program energi baru terbarukan, terutama program energi angin (*wind energy*). Sampai saat ini Italia mampu mencapai target lebih dari 5,000 megawatt dari sekitar 300 proyek energi anginnya.

Sebuah riset yang dilakukan oleh Rebecca Smoko, di departemen Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC), George Mason University, Fairfax, Virginia menyatakan bahwa mafia tertarik masuk di industri energi angin karena subsidi yang diberikan pemerintah mampu meningkatkan keuntungan sekitar 200 persen per tahunnya atau sekitar Rp15 miliar per tahunnya.

Pemerintah Italia sendiri

menetapkan harga per KWH energi angin yang diproduksi sebesar 180 Euro/kWH atau sekitar Rp27 ribu/kWH. Coba bandingkan dengan tarif listrik PLN terendah untuk konsumsi rumah tangga di Indonesia yang hanya sekitar Rp1400-an/kWh. Sudah tentu, subsidi yang diberikan pemerintah Italia itu adalah surga keuntungan bagi mafia.

Namun, beberapa kritikus dan pengamat energi global membawa kasus ini ke ruang lain: mengapa industri energi baru terbarukan bangkit di Eropa, termasuk di Italia?

Ini jawabannya. Dari sisi geopolitik, lewat proyek global *“Global Climate Change”* dan *“Green Energy”* yang didorong langsung oleh AS, percepatan program energi baru terbarukan di Eropa akan sangat membantu upaya AS untuk mendorong pengurangan ketergantungan negara Uni Eropa dari ekspor gas dari Rusia yang masih di angka 80% itu. *“...But today, the “green energy” sector has attracted increased attention from organized crime. Criminal circles’ interest in renewable energy is to a large extent fed by the U.S. and its allies’ incentive policy of “energy security” and other incentives in that sector, with a view as well to reducing the buying of Russian natural gas,”* tulis Vladimir Paltov, Middle East Expert di majalah *New Eastern Outlook* beberapa saat lalu.

Sekadar informasi, dibawah traktat perjanjian European *“20-20-20”*, seluruh anggota negara Uni Eropa mulai tahun 2008 sampai 2020 berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sampai 20%; meningkatkan energi efisiesi sampai 20% dan memproduksi 20% listrik dari energi baru terbarukan.

Program ambisus negara Uni Eropa ini ternyata diikuti oleh beberapa skenario kotor yang sudah disepakati oleh jaringan mafia global dengan petinggi-petinggi negara Uni Eropa. *“The ambitious “20-20-20” Plan, according to Europol research, has however been faced with obvious legislative incapacity, which has*

allowed organized crime to infiltrate the energy sector with its capital,” tambah Vladimir.

Kali ini, Vladimir tidak bicara kasus mafia di Italia. Dia bicara jaringan mafia global. Sebuah jaringan yang melibatkan klik kotor perusahaan multinasional finansial/ perbankan, perusahaan multinasional energi, pemimpin negara, kepentingan penguasaan ekonomi dan politik global. Ini maksud mafia yang dibicarakan Vladimir.

Karena, harus dipahami, salah satu pernyataan penting pada pertemuan di Davos pada 2013 lalu adalah untuk mewujudkan “Green Global Economy” dibutuhkan sekitar USD14 triliun. *“The world must spend an additional \$14 trillion on clean energy infrastructure, low-carbon transport and energy efficiency to meet the United Nations’ goal for capping the rise in average global temperatures”*. Demikian pernyataan World Economic Forum dalam sebuah report-nya.

Artinya, pengusaha besar, perusahaan multinasional dan pemimpin dunia harus bersatu mewujudkan itu. Dalam skala global, makna itu juga diartikan seperti ini: siapa saja yang mampu menguasai industri energi baru terbarukan global maka dialah yang mampu mengatur dunia. Maklum, cadangan energi fosil global sudah mulai menipis.

The Green Growth Action Alliance, sebuah koalisi yang terdiri dari 50 perusahaan keuangan, perusahaan besar, beberapa pemimpin negara dan beberapa NGO sudah siap mendorong agenda besar Davos tersebut. Koalisi tersebut dibentuk saat pertemuan negara G20 di Meksiko beberapa saat lalu. Koalisi ini dibawah koordinasi World Economic Forum (WEF). Banyak kalangan menilai, inilah jaringan mafia global itu.

Flare Network, sebuah LSM global yang mengkhususkan di kegiatan anti kejahatan transnasional mengingatkan bahaya mafia global

yang bermain di agenda “Green Global Economy” dan “Global Climate Change” ini. Organisasi yang beranggotakan 34 LSM yang tersebar di 22 negara ini menyebut ada agenda geopolitik kotor besar dibalik industri energi baru terbarukan di Eropa saat ini.

“We note once again that there is no sector of the economy into which the mafia could not seep, and its penetration does not know geographical boundaries. Organized crime is a problem concerning many countries. Development of the wind turbine and solar power industries is actively promoted by the European Union, and recent events indeed confirm that criminals have already penetrated into this sector in many EU countries. Closing this road to the mafia should be the international community’s main goal,” kata Presiden Flare Network, Michael Curto.

Lalu Apa Relevansi Cerita diatas untuk Indonesia?

Ingat, presiden SBY beberapa tahun lalu telah menyatakan Indonesia adalah negara terdepan di agenda “Global Climate Change” ini. Bahkan *blueprint* untuk memanfaatkan energi baru terbarukan sampai 2025 sudah dibuat.

Sebuah report dari US Departement of Commerce (2010) yang bertajuk “Renewable Energy Market Assessment Report: Indonesia” menyatakan bahwa Presiden SBY telah membuat keputusan untuk meningkatkan produksi energi baru terbarukan dari 7 persen menjadi 15 persen sampai tahun 2025. Untuk mencapai target itu, butuh sekitar 6.7 GW produksi energi dari beberapa proyek energi baru terbarukan. Energi panas bumi dan biogas akan menjadi fokus utamanya dan tidak menutup kemungkinan pengembangan energi baru terbarukan lain seperti angin, solar atau lainnya. *“Already several U.S. companies have invested*

in the Indonesian geothermal sector—a trend that will likely intensify as the policy incentives for geothermal energy continue to improve. U.S. government support for technical capacity-building, resource assessments, and trade promotion are helping spur this development. U.S. government agencies will continue to work with the government of Indonesia to maintain a competitive investment climate for the U.S. geothermal industry”.

Report itu juga mencatat, di pertemuan negara G-20 pada Oktober 2009 lalu, SBY mengeluarkan statemen cukup penting bahwa dengan tambahan bantuan dana dari luar negeri, Indonesia bisa mengurangi emisi karbon sampai 41%. *“Indonesia was crafting a policy that would unilaterally reduce its emissions by 26 percent by 2020 and would reduce its emissions by 41 percent with international support. To meet the goal, Indonesia will heavily invest in renewable energy and recommit to stopping deforestation”*.

Pernyataan penting ini disambut AS dengan disetujuinya pengucuran dana hibah (Millennium Challenge Compact Grant) sebesar USD600 juta dalam dari AS pada 2009 lalu. Kemudian pada 19 November 2011, sebuah perjanjian bertajuk *Millennium Challenge Compact Grant Agreement* ditandatangani Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton dan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo di Bali untuk melegalkan kesepakatan hibah tersebut. Hibah tersebut akan bergulir pada periode 2013-2018.

Agar kesepakatan itu tidak hancur gara-gara pergantian kepemimpinan maka John Kerry menyempatkan datang ke Indonesia pada Februari 2014 lalu. Tujuan Kerry, seperti yang ditulis oleh nytimes.com adalah: *“He aims, in particular, to be the lead broker of a 2015 United Nations treaty committing the world’s economies to significant cuts in carbon emissions and sweeping*



changes in the global energy economy”.

Kerry (baca AS.red) sadar, bahwa proyek “Global Climate Change”-nya mendapat perlawanan keras dari beberapa negara di Asia Pasifik. China, India dan beberapa negara di Asia Pasifik menolak mentah-mentah agenda besar AS ini. Mereka paham akan konsekuensinya jika mengikuti apa yang diinginkan AS.

Jadi, layak kalau Indonesia jadi negara penting untuk memuluskan agenda geopolitik energi baru terbarukan-nya di kawasan Asia Pasifik. Dan sangat layak juga jika bantuan sebesar USD600 juta itu harus mendulang hasil, minimal untuk memperlancar agenda geopolitik energinya di Asia Pasifik.

Melihat kasus di Eropa dan Italia, seharusnya rezim Jokowi-JK sebagai pengganti rezim SBY-Boediono harus paham dan

benar-benar melihat secara detail beberapa rencana program disektor ini. Ada hal mendasar yang perlu diperhatikan, Indonesia belum punya regulasi yang kuat di industri energi baru terbarukan jika dibandingkan regulasi di energi migas. Ini celah paling menggiurkan untuk mafia memainkan strategi gratifikasi agar beberapa keinginannya tercapai. Pahami juga, bahwa rata-rata mafia akan ‘main’ di sekitar subsidi dan pajak. Ini fokus mereka untuk mengeduk keuntungan.

Yang kedua adalah soal penguasaan dan kepemilikan. Dengan rata-rata pengelolaan di atas 20 tahun maka itu menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Mampukah negara (PLN) mengontrol kekuatan kapital (dan mafia energi)? Atau, justru sebaliknya, modal (dan mafia energi) akan mengontrol negara (PLN).

Melihat kasus di Italia, kelihatannya negara akan sulit mengontrol mereka. Jadi, pengawasan dari sisi hukum selalu terus dilakukan karena regulasi sektor ini sangat lemah.

KPK dan Kepolisian, seperti yang sudah dilakukan pemerintah Italia, harus tegas dan tidak tebang pilih lagi. Tak peduli itu perusahaan AS atau tidak, kalau melakukan korupsi harus segera ditindak karena ini menyangkut kepentingan dan kedaulatan negara di sektor energi.

Soal agenda besar di geopolitik energi di kawasan Asia Pasifik, Jokowi-JK seyogyanya segera mencermati agenda-agenda dibalik proyek global “Global Climate Change” ini mengingat energi baru dan terbarukan ini penting dan sangat dibutuhkan bagi kelangsungan ketahanan energi nasional, terutama kedaulatan energi negara bangsa ini. ◻

Faizal Rizki Arief





Sang Pangeran Disayang KPK

Bagaimana kabar keluarga Cikeas setelah Susilo Bambang Yudhoyono tak lagi menjabat sebagai petinggi negara? Apalagi, nama anak bungsunya yakni Edhie Baskoro Yudhoyono kembali harum di sidang Muhammad Nazaruddin, Rabu (06/01/2016) atau seminggu yang lalu.

Memang nama Edhie Baskoro bukan kali ini saja harum di persidangan kasus korupsi, yang melibatkan kader partai besutan bapaknya yakni, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Nama Edhie Baskoro pun dalam kasus Nazaruddin sebenarnya memang bukan hal yang baru untuk didengar. Bahkan kita bosan, karena namanya sampai saat ini masih belum terjamah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sudah berganti kepemimpinan itu.

Jika kita berkaca pada sejumlah fakta persidangan yang tertuang ada nama Edhie Baskoro dalam kasus Nazaruddin, sudah barang tentu sejumlah keterangan yang ada dalam fakta persidangan menjadi dasar KPK untuk menelisik sejauh mana peran anak bontot dari Presiden keenam SBY itu memainkan proyek yang digarap oleh Nazaruddin.

Seperti halnya, baru-baru ini Angelina Sondakh yang tak lain

adalah terpidana kasus korupsi anggaran proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional saat bersaksi di Presidengan, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus Muhammad Nazaruddin mengungkap fakta baru.

Ibas begitu biasa disapa, kata Angie kerap kali dilibatkan dalam sejumlah proyek yang biasa digarap oleh Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut. Terutama soal persetujuan untuk menggarap proyek, Nazaruddin biasa terlebih dulu meminta restu dari Ibas.

Angie yang berbalut kerudung merah muda dan kemaja putih mengaku, bisa meloloskan sejumlah proyek milik berbagai Kementerian atas seizin Pangeran. "(Perintah Nazaruddin) untuk memperjuangkan yang ada di komisi saya," ujar Angie yang bersaksi di sidang Nazaruddin.

Pangeran yang dimaksud Angie adalah Ibas. Pangeran, kata Angie kerap ikut mengatur semua proyek yang biasa dikerjakan Nazaruddin. Istri dari almarhum Adije Massaid itu pun mengaku, ada sejumlah proyek yang harus mendapatkan persetujuan dari Ibas, salah satu proyek yang diloloskan yakni, anggaran sejumlah proyek agar masuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN

tahun 2010 atas persetujuan Ibas.

Kala itu, Angie duduk sebagai anggota Komisi X DPR dan juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar). Sementara Nazaruddin merupakan Koordinator Banggar Partai Demokrat. Angie mengaku bahwa instruksi rekan separtainya itu atas sepengetahuan Ketua Umum dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat saat itu, yakni Anas Urbaningrum dan juga Ibas.

Kesaksian Angie pun selaras dengan kesaksian anak buah Nazaruddin yakni, mantan staf pemasaran Grup Permai Mindo Rosalina Manulang. Saat bersaksi

Kemendiknas.

“Ya saya juga enggak nanya itu untuk Ibu (Angelina) sendiri atau untuk orang lain. Cuma di BBM dibilang (Angelina) untuk pembahasan itu, dia (Angelina) sama teman-teman,” kata Rosa beberapa waktu lalu.

Perkenalan Angie dengan Mindo sendiri pertama kali dikenalkan oleh Nazaruddin. Perkenalan Angie dengan Rosa tak lain untuk mengatur mengenai proyek-proyek mana saja yang harus dia perjuangkan. Namun, Angie menyebut tidak semua proyek berhasil dia perjuangkan. Dari 16 proyek dalam daftar yang diserahkan

sebelumnya.

Kemanakah KPK selama ini? Apa informasi yang datang dari berbagai pihak akan disimpan begitu saja tanpa tindak lanjut, seharusnya KPK jadi tangan pertama yang berani mencontohkan bahwa hukum tak pandang bulu, siapapun dia dan apapun jabatannya akan tetap ditindak jika ada bukti-bukti terkait.

Entah kenapa, belakangan ini Nazar pun tidak pernah menyebut-nyebutnya lagi. Santer beredar kabar jika Nazar 'melempem' menyuarakan hal yang sebelumnya disuarakan lantaran adanya *deal* dengan pihak keluarga Cikeas.



dalam persidangan kasus dugaan penerimaan suap penganggaran proyek Kemendiknas serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan terdakwa Angie, Kamis (11/10/2012), Mindo menyebutkan Angie tidak sendirian menikmati uang dari Grup Permai terkait pembahasan anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional.

Sebab, diakui Rosa Angie pernah mengaku pembahasan anggaran dilakukan bersama teman-temannya di DPR. Grup Permai, kata Rosa, sudah menyerahkan Rp 15 miliar ke Angie untuk pembahasan anggaran proyek perguruan tinggi di

Rosa, dia hanya berhasil menggolkan empat hingga lima proyek yang nilainya tidak lebih dari Rp100 miliar.

Angie mengatakan, perintah untuk memperjuangkan anggaran mendapatkan instruksi dari izin pangeran “Kalau Nazar bilang ini perintah Ketum dan izin pangeran,” ungkap Angie.

Nazaruddin pun sejak dulu sudah bernyanyi bahwa Ibas ini banyak main proyek dan telah memberikan bukti kepada KPK terkait aliran dana sebesar US\$ 450 ribu. Bahkan disebutkan bahwa Ibas pernah memarahi Sutan Bhatoegana atas kesaksiannya terkait Saipem yang bisa kita korelasikan pada berita

Seiring berjalannya waktu, nama Ibas pun kembali membumi manakala ada informasi soal aliran duit yang beredar melalui jejaring sosial Twitter dari akun @AbimanyuAbiputro, Minggu (10/2/2013). Dalam akun tersebut memberikan bukti foto yang disebutkan laporan keuangan perusahaan Muhammad Nazaruddin yang disita KPK.

Dalam laporan tersebut, Ibas menerima USD 900 ribu di kurun waktu 18 Januari-29 Desember 2010. Beberapa akun yang menanggapi postingan informasi tweet @AbimanyuAbiputro ini mempertanyakan keabsahan

data yang disebar itu. Namun, berdasar pengakuan dari akun @AbimanyuAbiputro lewat tweet-nya, laporan keuangan ini diperolehnya dari sumber di KPK.

Beberapa hari pasca informasi yang beredar lewat jejaring sosial itu, lantas beredar dokumen yang diklaim sebagai aliran dana Hambalang di kalangan awak media. Dalam dokumen yang dikabarkan merupakan catatan perusahaan grup Permai yang dibuat Yulianis itu disebutkan jika Ibas menerima uang senilai US\$ 900 ribu untuk dua transaksi.

Transaksi itu terjadi pada 29



April 2010 dan 30 April 2010. Pada transaksi yang berlangsung 29 April 2010 Ibas menerima dana senilai US\$600 ribu. Dana diserahkan oleh staf Nazar bernama Amin R. Pada 30 April 2010, Ibas kembali mendapat dana senilai US\$300 ribu yang diserahkan oleh staf bernama Bahri.

Dokumen data tentang transaksi keuangan perusahaan Nazar yang mengalir ke Ibas ini menjadi hangat diperbincangkan setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka dan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Apalagi, dalam wawancara eksklusif dengan RCTI, Anas menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tahu

tentang aliran dana ini.

Bahkan dalam salah satu pertemuan di Cikeas yang dihadiri Majelis Tinggi 2011 lalu, SBY sempat marah lantaran informasi ini. Anas menyebutkan Amir Syamsuddin yang saat itu menjabat sekretaris Majelis Tinggi juga tahu tentang informasi ini.

Belum lama, Yulianis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/3) lalu kemudian mengungkapkan aliran duit ke Ibas sebesar USD 200 ribu terkait kongres Partai Demokrat. Yulianis memastikan jika duit tersebut bukan dari uang proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Anak buah Nazaruddin itu mengklaim jika Permai Grup tidak pernah mengeluarkan uang untuk mengamankan proyek bernilai Rp 2,5 triliun tersebut.

Menilik ke Belakang

Memang, bukan kali ini saja nama Ketua Fraksi Partai Demokrat itu harum dalam sejumlah kasus yang digarap terpidana kasus Wisma Atlet tersebut. Seperti halnya, nama Ibas ada dalam Berita Acara Pemeriksaan milik Yulianis, yang merupakan bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai.

Ketika itu, Yulianis mengakui nama Ibas masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya. Menurut dia, saat itu penyidik memeriksanya dalam kaitan aliran dana proyek Hambalang di Kongres Partai Demokrat 2010.

Yulianis mengakui, dalam catatan keuangannya hanya ada satu kali pengeluaran uang buat Ibas dari Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin, yakni USD 200 ribu, terkait Kongres Partai Demokrat 2010. Dia pun mengaku Nazaruddin langsung yang memintanya menuliskan nama Ibas dalam catatan itu.

Mencuat di Kasus SKK Migas

Setelah Hambalang, ada SKK Migas kini kasus pengadaan alat kesehatan di rumah sakit khusus

Universitas Udayana. Namun setelah beberapa kesaksian yang menyebut namanya, mengapa hingga kini KPK belum kunjung memiliki keberanian untuk memanggil Ibas? Hal ini jelas patut dipertanyakan.

Seperti halnya disampaikan Anas Urbaningrum, sangat relevan jika Ibas terlibat dalam kasus ini, karena dana yang digunakan untuk Pilpres SBY dari Partai Demokrat. Informasi-informasi yang diberikan saksi seharusnya ditindak lanjuti agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Namun hingga kini KPK belum juga memanggil Ibas.

Kasus berikutnya ada ketika Rudi Rubhiandini, yang tak lain adalah mantan Ketua SKK Migas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saat itu Sutan Bhatoegana dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor Februari 2014 lalu.

Dalam sidang yang digelar Kamis (5/6) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Sutan secara gamblang menyebut bahwa Ibas menekan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini untuk memenangkan sebuah proyek di SKK Migas. Sutan mengungkapkan adanya permainan proyek di SKK Migas, di mana dalam proyek itu Ibas ikut terlibat.

Keberanian Sutan mengungkap keterlibatan Ibas bukan tanpa sebab, karena dia merasa disudutkan atas pengakuan Rudi Rubiandini, yang menyebut dirinya meminta uang dalam proyek tersebut. Sutan pun akhirnya membeberkan pihak-pihak yang ikut serta dalam kasus ini, salah satunya Ibas.

Di persidangan tersebut Sutan mengaku bahwa pernah dilobi utusan Ibas terkait proyek Gas Alam Gendaro-Gehem di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. Pada pertemuan itu, utusan Ibas meminta Sutan untuk memenangkan PT Rekayasa Industri yang mengikuti tender proyek tersebut. Dan salah satu utusan tersebut adalah Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala yang ternyata juga adalah teman sekolah Ibas. • Wisnu Yusep/M Zhacky Kusuma/Nebby

KPK Tetapkan Anak Buah Megawati Jadi Tersangka

Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti (DWP) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penetapan itu dilakukan pasca operasi tangkap tangan KPK pada Rabu (13/1).

Wanita yang kerap disapa Yanti itu diduga menerima sejumlah suap dari salah satu pengusaha berinisial AKH. Berdasarkan informasi, AKH memiliki nama lengkap Abdul Khoir.

Selain Yanti, lembaga antirasuah juga menetapkan dua orang lainnya yakni UWI atau Uwi dan DES alias Erwan. Keduanya merupakan pihak swasta. AKH sendiri tak luput dari jeratan status tersangka KPK.

Untuk Yanti, Uwi dan Erwan diduga sebagai penerima suap



berupa uang sebesar 66 ribu Dollar Singapura. Sedangkan Abdul selaku pemberi suap.

“Kemudian dilakukan gelar

perkara yang dihadiri semua pimpinan. Sejalan dengan itu DWP, UWI, DES diduga sebagai penerima,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat jumpa pers di gedung KPK, Kamis (14/1).

Ketiganya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“AKH diduga sebagai pemberi, disangka melanggar Pasal 5 huruf a atau b, atau Pasal 33 UU Tipikor,” ujar Agus.

Menurut mantan Ketua LKPP itu, suap yang diberikan Abdul kepada Yanti melalui Uwi dan Erwan, berkaitan dengan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016. *Wisnu*

SDA Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa KPK

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) divonis enam tahun penjara. Hal itu lantaran dirinya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2010-2011 dan 2012-2013. Dia juga dinyatakan bersalah karena memakai Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi sejak 2011-2014.

“Menyatakan terdakwa SDA terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama enam tahun penjara,” papir Ketua Majelis Hakim, Aswijon, saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/1).

Selain hukuman pidana, SDA juga dihukum membayar denda

sebesar Rp300 juta, yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman kurungan selama tiga bulan. Tapi ternyata, tak sampai disitu putusan Hakim.

Kader PPP itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp1,8 miliar. Jika uang tersebut tidak dibayarkan, akan ditukar dengan ganjaran kurungan selama dua tahun.

Vonis tersebut diberikan, karena SDA terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagaimana diubah kedalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Kendati demikian, hukuman yang diterima SDA ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut agar Majelis Hakim memvonis SDA hukuman pidana selama 11 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsidair enam bulan kurungan.

Nominal beban uang pengganti yang dijatuhi Majelis Hakim juga lebih sedikit. Diketahui, Jaksa KPK



meminta SDA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2,325 miliar. Majelis Hakim pun tidak memberikan hukuman berupa pencabutan hak politik, sebagaimana tuntutan Jaksa KPK.

Atas vonis tersebut, SDA akan memikirkan lebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengajukan banding. “Saya pikir-pikir dulu,” kata SDA. *Zaenal Arifin*

Menteri Yasonna: Gafatar Tak Berbadan Hukum

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memastikan Gerakan Fajar Nusantara tidak berbadan hukum di kementerian.

“Dari info yang saya peroleh, itu tidak berbadan hukum di kementerian. Tapi saya sudah minta agar dicek lagi, ulangi lihat lagi jangan sampai ini ya,” kata Menteri Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/1).

Laoly mengatakan ada beberapa pandangan termasuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sudah menyampaikan pandangan terkait Gafatar. Dari pihaknya sendiri yakni dari aspek yuridis akan diperjelas terlebih dahulu status Gafatar apakah berbentuk organisasi kemasyarakatan atau berbentuk badan hukum yang lain.

“Dari aspek yuridis ormas kan enggak perlu badan hukum. Tapi ini harus jelas statusnya apakah ini ormas atau berbadan hukum,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya akan terus mencari dan mengumpulkan data terkait Gafatar. “Kalau tidak berbadan hukum, dia tidak terdaftar, tapi saya suruh cek lagi,” katanya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan keberadaan ormas Gafatar terbentuk akibat perpecahan antara Ahmad Mussadeq dengan Panji Gumilang yang keduanya adalah anggota NII.

Panji Gumilang kemudian mendirikan MIM dan Ahmad Mussadeq mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiah yang kemudian berubah menjadi komunitas Millah Abraham (Komar).

“Karena Komar ini dinilai oleh MUI sebagai aliran sesat dan menyesatkan sehingga pimpinannya yaitu Ahmad Mussadeq pada tahun 2009 dipidana empat tahun. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak akhirnya ganti “kulit” menjadi ormas Gafatar yang dipimpin Mahful Muis dengan meng-cover kegiatannya bersifat sosial,” kata Tjahjo.

Dia melanjutkan, saat ormas Gafatar mengajukan SKT ke Kesbangpol pada 2 November 2011 ditetapkan ditolak bahkan sudah tiga kali mereka mengajukan tetapi tetap tidak dikeluarkan.

Kemudian pada 5 April dan 30 November 2012 Ditjen Kesbangpol membuat surat edaran kepada para kesbangpol Provinsi dan kabupaten-kota untuk tidak mengeluarkan SKT kepada Gafatar dan agar waspada dan terus memantau aktivitas ormas tersebut.

“Artinya Kesbangpol Kemendagri sudah mengantisipasi kegiatan Gafatar, kalau ada kesbangpol yang mengeluarkan SKT pada 2011 itu masih wajar karena memang surat dari Pusat baru dibuat 2012,” katanya.

“Dari putusan inilah maka pemerintah tidak bisa membubarkan Gafatar tetapi kalau dilihat ormas ini merupakan aliran sesat dan menyesatkan maka seharusnya diarahkan ke pakem ya domainnya Kejaksaan, barangkali hal ini yang harus didiskusikan bersama,” katanya.

Mendagri mengatakan, tujuan dibentuknya ormas sesuai UU Ormas diantaranya adalah harus menjaga dan memelihara serta melestarikan norma, etika, budaya dan lain-lain termasuk menjaga persatuan dan kesatuan.

“Dari sini juga perlu didiskusikan apakah kegiatan Gafatar ini bertentangan dengan hal itu,” katanya. *Wisu*



Yusril: Ketajaman Kejaksaan Agung Tumpul di Tangan Prasetyo

Kejaksaan Agung saat ini tidak memiliki ketajaman dalam menganalisa sebuah kasus, khususnya korupsi. Begitu dikatakan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Pendapat itu dia ungkapkan berdasarkan fakta atas putusan praperadilan yang diajukan eks Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Dahlan Iskan, yang membatalkan penetapan tersangka Kejagung.

Menurutnya, Muhammad Prasetyo Cs kerap memaksakan untuk menetapkan status tersangka. Padahal mereka belum memiliki alat bukti dan argumentasi hukum yang kuat.

“Kelemahannya memang ini masalah ketajaman analisis. Sebenarnya dari aparatur Kejaksaan. Sering kali misalnya alat bukti tidak cukup, argumentasi hukum tidak kuat. Tapi tetap diteruskan, akhirnya mentah,” papar Yusril, di kantor DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Jakarta, Sabtu (9/1).

Hal itu menurut Yusril menjadi kelemahan yang dimiliki Korps Adhyaksa. Kurang profesional aparatur Kejaksaan menjadi salah satu hal yang disoroti oleh Yusril.

Sebenarnya, sambung dia, pembenahan itu tidak sulit untuk dilakukan. Kejaksaan hanya tinggal melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku.

“Ya menurut saya harus bekerja betul-betul profesional. Dan betul-betul menerapkan hukum itu dengan tepat,” saran dia.

Seperti diketahui selain kalah dalam gugatan melawan Dahlan Iskan Kejaksaan Agung juga kalah tahun lalu dengan PT Victoria Securities Indonesia. Kekalahan didua kasus ini membuat posisi Prasetyo terus disorot dalam wacana reshuffle jilid II yang diyakini akan segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. *Wahyu Romadhoni*



Mengantisipasi Resesi Ekonomi 2016 dan Kewaspadaan Bangsa

Belum juga kita dalam kecepatan penuh menjalani kehidupan awal 2016, Indonesia sudah terancam dihempas resesi ekonomi dunia. Itu ditandai dengan devaluasi Yuan, menukiknya harga minyak yang mungkin akan mencapai di bawah 20 dolar AS per barel, dan koreksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,3 persen menjadi 2,9 persen.

Yuan lagi-lagi devaluasi karena masalah harga minyak dunia yang jatuh dan melorotnya harga saham. Harga minyak menukik karena Amerika Serikat sukses mengeksplorasi minyak dan *oil shale*, suatu teknologi yang perangkatnya cukup diangkut dengan mobil *pick-up*. Ini mengakibatkan biaya produksi minyak mentah menukik luar biasa.

Negara manapun yang mengeluarkan biaya produksi minyak mentah (*crude oil*) di atas 20 dolar AS per barel, akan terpukul karena biaya teknologi untuk eksplorasi minyak dan *oil shale* di bawah 4 dolar AS per barel. Saat yang sama, dengan menyebar luaskan penggunaan pembangkit listrik bertenaga matahari, solar panel, dan angin, AS telah berhasil mengkonversi penggunaan energi fosil ke tenaga matahari untuk listrik sebesar 6 juta barel perhari.

Ini semua di luar dugaan masyarakat dunia. Awalnya kalangan ahli teknologi perminyakan menduga penggunaan teknologi untuk *shale*, baru akan mencuat pada 2016. Kenyataannya justru lebih cepat. Demikian juga dengan penggunaan energi baru terbarukan (*renewable energy*).

Hillary Clinton dari Partai Demokrat dalam kampanye Pilpres 2016, sejak medio 2015 selalu membawa isu pentingnya energi surya dan angin. Presiden AS Obama pun menerapkannya melalui kampanye perubahan iklim

global dengan membuat perjanjian penggunaan energi global yang bersih bersama RRC. Jerman, Jepang, RRC, India mengikuti jejak penggunaan energi terbarukan ini. Akibatnya, seperti yang kita saksikan sekarang, harga minyak dunia menukik.

Direktur Eksekutif IMF Christine Lagard memperkirakan, harga minyak dunia berfluktuasi antara 5-15 dolar per barel. Menyusul kemudian Bank Dunia yang mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi di seluruh belahan dunia.

Ini berarti, perang harga minyak akan berlanjut. Memperhatikan fluktuasi harga minyak sejak OPEC berdiri tahun 1960, tidak ada perubahan harga itu tidak berhubungan dengan peristiwa politik. Atas dasar itulah sejak 14 Juli 2008 saat harga minyak dunia mencapai 147 dolar AS per barel, saya menyampaikan bahwa harga minyak akan tetap menjadi salah satu senjata perang ekonomi.

Henry Kissinger mengatakan, jika ingin mengendalikan suatu negara, kendalikan energinya. Perang harga minyak ini juga beriringan dengan perang nilai tukar kendati Yuan sudah menjadi bagian *Special Drawing Right* (mata uang IMF) dengan bobot 10,11 persen. Maka saat dua lembaga multi lateral itu mengumumkan proyeksinya, saya berkomentar di lingkungan wartawan senior, "Amerika sedang memukul telak musuh-musuhnya dengan tujuan dominasi ekonominya tidak tergoyahkan".



Dalam ekonomi internasional, selain nilai tukar dan komoditas seperti minyak, ada dua variabel lain, yakni suku bunga dan inflasi sebagai faktor yang harus diperhitungkan dengan seksama. Oleh AS, soal suku bunga dan inflasi pun dimanfaatkan sebagaimana terbukti dunia menanti-nanti kebijakan the Fed untuk kenaikan bunga bank sentral AS (*fed fund rate*). Sementara inflasi akan mengekor melalui salah satu atau kumulasi dari tiga hal itu yang akibatnya adalah kenaikan harga-harga bagi negara yang memiliki ketergantungan impor untuk memenuhi kebutuhan pasar domestiknya.

Konstruksi ini menunjukkan, AS sebagai “penguasa ekonomi dunia” tidak ingin bernasib seperti Jepang yang ekonominya disalib oleh RRC dari segi volume (PDB) dan daya tawar. Selain mengguncang RRC, AS bahkan juga “memukul” Rusia, Arab Saudi, Venezuela, dan Brazil. Atau menghentak “saudaranya” sendiri, seperti Kanada, Australia dan Inggris, bahkan menyentil sahabat dekatnya, Singapura dan Korea Selatan. Ini terlihat pada indeks persaingan global dan indeks kreativitas global yang dirilis WEF.

Dalam bahasa yang lain, AS nyaris menggunakan kekuatan penuh guna memenangkan perang ekonomi sejak 2009 hingga saat ini. Tekad ini lagi-lagi tersurat dalam *National Security Strategy of USA* yang ditandatangani Presiden AS Obama pada Februari 2015. Dalam dokumen itu, AS menyatakan bahwa ekonomi AS adalah mesin pertumbuhan ekonomi dunia dan sekaligus merupakan sumber stabilitas perekonomian global.

Artinya, jika kepentingan ekonomi politik dan militer AS terganggu, maka AS mampu melakukan penurunan putaran mesin ekonomi dunia sekaligus membuat ketidakstabilan ekonomi

belahan negara manapun. Yang tidak habis pikir, tiba-tiba Korea Utara mengumumkan kepemilikan bom atom yang didahului dengan peluncuran Satelit RRC ke orbit untuk berbagai kepentingan.

Seperti saya rilis sejak 2009, hampir semua dimensi kehidupan manusia di dunia masuk dalam ajang pertarungan berpijak pada keserakahan dan tekad menjadi dominan. Bagi Stiglitz, Krugman, PA Diamond, dan T Piketty, hal itu akan melemahkan perekonomian itu sendiri sehingga berbuah ketimpangan di semua dimensi kehidupan (Lihat kajian Universitas Stanford terakhir, 20 jenis ketimpangan di AS).

Bagi Indonesia yang dari segi PDB berada di ekor G-20, sebenarnya bisa mempengaruhi situasi global, minimal regional. Ibarat ekor binatang-binatang buas bertenaga, Indonesia mampu mempengaruhi kekuatan “binatang” itu untuk bertahan dan memenangkan pertarungan dari situasi “*survival of the fittest*”, siapa yang unggul, dialah yang bertahan.

Caranya bukan dengan menempatkan diri sebagai obyek, tapi sebagai subyek-obyek, obyek-subyek. Saya menyebut posisi ini sebagai *close-open circuit system*. Dengan posisi ini, darah (sebagai kata ganti uang, atau utang luar negeri) tidak boleh dipasok dari pihak luar. Darah harus mengalir karena kerja otot dan syaraf sehingga melahirkan ketahanan dan pertahanan diri. Artinya, tidak semua sektor harus terbuka, tidak semua sektor harus tertutup.

Analisis strategis-lah yang menentukan kebijakan untuk terbuka-tertutup, tertutup-terbuka. Dalam Perspektif ini, Indonesia harus mendayagunakan kelebihanannya pada letak geografi untuk geopolitik ekonomi (termasuk garis pantai

kedua di dunia), luas wilayah, jumlah penduduk, dan kekayaan sumberdaya alam. Mengabaikan kelebihan hal ini, akan memosisikan Indonesia sebagai obyek dari pergumulan ekonomi global tak berkesudahan.

Pergumulan itu menempatkan kerjasama ekonomi bukanlah variabel yang sama dan sebangun dengan persaingan itu sendiri. Pesannya adalah, setiap negara (atau pribadi atau badan usaha) yang fundamental ekonomi makronya rapuh, pasti akan menjadi korban perang ekonomi itu. Secara sistemik berarti ancaman resesi 2016 akan menahan laju pertumbuhan ekonomi, menyurutkan putaran mesin perekonomian, dan memukul daya beli masyarakat.

Situasi inilah yang mendorong saya untuk memperbaiki proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016. Di hadapan Komisi XI DPR-RI dan Komite IV DPD-RI saat merespon RAPBN 2016 dan Nota Keuangan, saya memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 berkisar 4,8-5,2 persen. Dengan kondisi internal yang efektivitas kebijakannya agak lemah, kini saya memroyeksi 4,8-5,0 persen. Karenanya upaya mengatasi 11,2 persen kemiskinan, penurunan pengangguran menjadi 5,9 persen, dan menurunkan rasio ketimpangan (Gini rasio) menjadi di bawah 0,432 menghadapi tantangan berat.

Apalagi pasar domestik bakal lebih seru diserang karena efektifnya MEA yang berarti soko guru perekonomian bangsa (UMKM dan Koperasi) juga akan ketat bersaing dengan UMKM negara tetangga. Jika masyarakat tidak boleh manja, saya setuju. Tapi, di mana peranan negara dalam rangka memenuhi amanat Alinea IV Kata Pembukaan UUD 1945, saya belum bisa menjawabnya. Uraian di atas adalah bentuk kewaspadaan yang mesti dibangun bangsa Indonesia guna tegaknya kedaulatan ekonomi negara. ◻





MoU Freeport Segera Berakhir, Negara Tidak Boleh Lagi Kecolongan

Perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia yang memberikan izin Freeport untuk melakukan ekspor konsentrat akan berakhir pada 24 Januari 2016. Selama 6 bulan terakhir dalam perjalanan perpanjangan kontrak ini, masih ada beberapa kewajiban Freeport yang masih belum dipenuhi, di antaranya kewajiban divestasi 30 persen saham Freeport ke Pemerintah Indonesia yang dilakukan dalam 2 tahap. Saat ini saham yang dimiliki Indonesia hanya 9,46 persen. Jangankan melakukan divestasi tahapan pertama (11,64%), penawaran divestasi kepada Pemerintah yang semestinya dilakukan pada 14 Oktober 2015, sampai sekarang penawarannya masih urung dilakukan.

Belum melakukan penawaran, polemik Freeport "Papa Minta Saham" justru malah muncul ke publik, sehingga berujung dengan pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. DPR pun kemudian menyoroti kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM karena memberikan perpanjangan izin ekspor, padahal berdasarkan UU Minerba, ekspor mineral haram dilakukan kecuali telah melakukan hasil pemurnian.

Kini MoU yang mengizinkan Freeport melakukan ekspor konsentrat tinggal beberapa pekan lagi. Publik harus terus mengawasi, jangan sampai kekayaan emas di tanah Papua bisa dengan mudah dibawa keluar dari Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Serta Ayat 3, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI, Pius Ginting

menolak dengan tegas jika terjadi perpanjangan kembali masa berlaku MoU tersebut, ia mengatakan sejak awal MoU tersebut melanggar UU Minerba. "Izin ekspor konsentrat adalah pelanggaran Undang-Undang Mineral dan Batubara," kata Pius kepada Aktual.com.

Dalam penjelasannya Pius mengatakan bahwa UU Minerba tersebut juga mengamanatkan dalam 5 tahun sejak disahkannya pada tahun 2009, maka barang Mineral yang dibawa keluar harus sudah dimurnikan terlebih dahulu.

Senada dengan WALHI, Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan mengungkapkan, dengan berbagai alasan dan pertimbangan serta pelanggaran yang telah dilakukan oleh Freeport, sebaiknya pemerintah menolak perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada Freeport. "Sebaiknya tidak usah diperpanjang lagi. Freeport sudah terlalu banyak untung dan merugikan negara kita."

Menurut Dani, selama ini Freeport terkesan dimanjakan dengan berbagai aturan yang mestinya Freeport patuhi. Sudah saatnya Freeport disamaratakan dengan pemegang kontrak karya lainnya. "Freeport harus diperlakukan sama dengan pemegang kontrak lain yang dilarang untuk ekspor bahan mentah."

Apalagi, lanjut Dani, pelarangan ekspor bahan mentah sudah jelas tertuang dalam Undang Undang Minerba. "Jika Freeport tidak mau mengindahkan aturan itu, mestinya pemerintah dalam hal ini kementerian ESDM tidak lagi memberikan izin perpanjangan."

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean mengatakan Freeport selalu "keras kepala" dan tidak menghormati hukum yang berlaku di negara ini. Mereka layak mendapatkan sanksi dan teguran keras bahkan hingga peringatan untuk memutuskan kontrak karena Freeport melanggar poin-poin kesepakatan dalam MoU maupun

Kontrak Karya.

Lebih lanjut menurut Ferdinand, ada 3 poin penting yang semestinya dipaksakan pemerintah kepada Freeport sebelum memberikan izin ekspor.

Pertama, pemerintah harus meminta uang jaminan pembangunan smelter yang harusnya sesuai progres minimal 50%, maka kita meminta pemerintah memaksa Freeport memberikan dana USD1 Milyar kepada pemerintah sebagai jaminan pembangunan smelter yang saat ini masih 0%.

Kedua, kita minta pemerintah agar segera memaksa Freeport membayarkan deviden yang belum dibayarkan Freeport sejak 4 tahun lalu.

Ketiga, jika syarat itu tidak dipenuhi maka pemerintah harus menetapkan bea keluar sebesar minimal 15% untuk ekspor konsentrat Freeport dengan tambahan sanksi keras tidak akan melanjutkan operasi Freeport di Papua pasca 2021. Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara ini adalah pemilik sumber daya alam yang sah dan negara ini berdaulat serta tidak bisa didikte oleh siapapun.

"Untuk itu EWI mendesak Presiden Jokowi untuk membuktikan keberpihakannya pada bangsa dan tidak sekedar berbasa-basi tentang nasib Freeport, kita perlu tindakan konkret bukan cuma kata-kata yang menghibur," tegas Ferdinand.

Indonesian Resources Studies (IRESS) mendesak pemerintah untuk tidak hanya menolak izin perpanjangan ekspor konsentrat Freeport, tetapi juga menolak perpanjangan izin tambang kepada PT Freeport. Peneliti IRESS, Marwan Batubara mengungkapkan, pemerintah RI juga diminta untuk tidak perlu proaktif dalam program divestasi saham Freeport.

"Program divestasi saham adalah satu paket dengan isu perpanjangan operasi tambang dalam proses renegosiasi kontrak. Biarkan Freeport menjalankan kewajiban kontraknya dalam Kontrak Karya untuk mendivestasi saham. Tapi di



Marwan Batubara



Riza Pratama

sisi lain pemerintah dituntut untuk menegaskan sikap bahwa Indonesia tidak ingin memperpanjang operasi tambang atau memberi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Freeport,” bebrny dalam pesan elektronik yang diterima *Aktual.com*.

Marwan mengungkapkan, pemerintah RI perlu membuat pernyataan bahwa kontrak/operasi tambang Freeport tidak akan diperpanjang. “Jadi pemerintah harus tegas menyatakan bahwa sejak 2021 Negara RI bermaksud untuk menguasai kembali wilayah Tambang Freeport di Timika.”

Marwan menilai, Saat ini Freeport McMoRan tampaknya sedang menuju kematian. Karena itu IRESS menganggap Pemerintah tidak perlu lagi membahas perpanjangan operasi Freeport sejak 2021. “Karena hal itu berarti Indonesia menolong Freeport, dan hanya akan memperpanjang nafas Freeport McMoRan.”

Marwan membeberkan, dalam kondisi harga komoditas tambang dan migas yang terus terpuruk saat ini, maka harga saham Freeport McMoRan/FCX telah mencapai titik terendah, USD4,31 per lembar, sejak Desember 2000 (NYSE: 11/12/2016). Pada 2010-2011 saham FCX pernah mencapai USD60 per lembar. Harga saham Freeport berpotensi untuk turun lebih rendah dan Freeport McMoRan siap-siap untuk bangkrut.

Olehnya itu, lanjut Marwan

Pemerintah RI diminta untuk membahas dan menyiapkan rencana strategis yang perlu diambil guna kelanjutan operasi tambang Timika oleh BUMN Indonesia. “Pembahasan perlu melibatkan seluruh potensi nasional, kementerian/lembaga terkait, serta para pakar dan profesional dari berbagai bidang yang relevan.”

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya Widya Yudha juga angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya dalam UU Minerba tidak ditemukan klausul relaksasi seperti MoU tersebut.

“Dalam UU Minerba tidak ada klausul tentang relaksasi atau keringanan dalam membangun smelter dan kemudian memperbolehkan ekspor konsentrat,” tulisnya kepada *Aktual.com*.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pembangunan smelter berdasarkan UU Minerba paling lambat dibangun pada tanggal 13 Januari 2014, sehingga jika tidak dilaksanakan dan tetap mengekspor konsentrat maka terjadi pelanggaran atas UU Minerba tersebut.

Untuk itu ia menyarankan pemerintah mengeluarkan Perppu agar kebijakan yang dijalankan memiliki landasan payung hukum. “Maka pemerintah harus segera keluaran Perppu agar semua kebijakan yang dikeluarkan mempunyai payung hukum yang kuat,” tukasnya.

Selain itu ia juga menyampaikan bahwa progres divestasi juga sudah molor dari kesepakatan. Molornya proses divestasi maka mengakibatkan molornya kesempatan nasional untuk berpartisipasi dalam industri di Freeport. Sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan dari pihak Indonesia untuk menikmati keuntungan yang didapat melalui kepemilikan saham dari hasil divestasi.

Anggota Komisi VII DPR-RI, Kurtubi juga mengkritik keras PT Freeport Indonesia yang belum memenuhi kewajiban terhadap pemerintah sebagaimana yang telah disepakati di Nota Kesepahaman (MoU). Selain itu, menurutnya Papua layak untuk ditetapkan menjadi kawasan industri khusus berbasis tambang dalam rangka pembangunan Papua. “Mestinya izin ekspor dikaitkan dengan komitmen untuk membangun smelter di Papua agar terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur.”

PT Freeport Indonesia melalui juru bicaranya, Riza Pratama, berkilah jika pihaknya dikatakan enggan menaati aturan dan syarat pengajuan perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport. “Sampai saat ini, mengenai pengajuan surat ke kementerian ESDM masih dalam jadwal progresnya.”

Riza menuturkan, surat pengajuan izin telah diberikan kepada Kementerian ESDM sejak akhir Desember tahun 2015 lalu. Namun, hingga saat ini kementerian ESDM belum memberikan kepastian terkait ajuan tersebut. “Saat ini kami masih menunggu review dari ESDM. Pengajuannya kita berikan pada akhir Desember lalu.”

Ketika ditanyakan mengenai progres kemajuan perkembangan pembangunan smelter PT Freeport di Jawa Timur, sebagai salah satu syarat dan kesepakatan bersama pemerintah Indonesia. Riza menyebut sesuai dengan perencanaan. “Iya, mengenai Smelter tersebut, termasuk dalam surat permohonan ekspor yang telah kami ajukan.”

Najamuddin Arafah-Dadang Sah-Arbie Marwan



Harga Minyak Terus Anjlok, SKK Migas: Ketahanan Energi Makin Terancam

Menariknya harga minyak dunia ke level terendah dalam kurun waktu 12 tahun terakhir diprediksi akan mengancam ketahanan energi nasional.

Pasalnya dalam kondisi jangka

panjang dengan harga minyak yang rendah, dari sisi pasokan akan membuat kegiatan eksplorasi dan produksi menurun, akibatnya produksi nasional cenderung akan menurun dan tambahan cadangan

minyak juga tidak ada.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) yang juga Kepala Divisi PPA SKK Migas, Benny Lubiantara mengungkapkan, pada kondisi produksi nasional menurun sementara harga minyak rendah, akan mendorong konsumsi yang boros sehingga permintaan akan terus meningkat.

“Dalam jangka panjang, kesenjangan atau gap antara pasokan/produksi dengan permintaan/konsumsi akan semakin melebar, sehingga stok atau cadangan akan berkurang”, kata Benny saat acara diskusi Luncheon Talk Indonesia Oil & Gas Industry The Challenges Ahead di Gedung SKK Migas City Plaza, Rabu (13/1).

Benny melanjutkan, dengan kondisi kesenjangan yang terjadi, konsumsi yang semakin meningkat, pada saat harga minyak kembali naik tentu akan mengancam ketahanan energi nasional.

“Ya ketahanan energi nasional menjadi sangat rentan,” lanjutnya.

Arbie Marwan

Bom Meledak di Sarinah, BI Turunkan Suku Bunga Jadi 7,25%

Kecemasan investor menjelang pengumuman suku bunga acuan perbankan (BI Rate) semakin meninggi ketika terjadi bom Sarinah, Jakarta. Meski BI menolak menyebutkan bahwa kebijakan penurunan ini terkait adanya aksi bom Sarinah, namun aksi penurunan suku bunga berkaitan dengan peristiwa tragis tersebut. Akhirnya, BI berani menurunkan BI 25 basis points (bps) menjadi 7,25 persen.

“Ruang pelonggaran kebijakan moneter semakin terbuka serta meredanya ketidakpastian pasar pasca kenaikan Fed Fund Rate pada Desember lalu,” tandas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara di Gedung BI, Jakarta, (14/1).

Selain menurunkan BI Rate,



kata Tirta, BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen serta menurunkan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,75 persen.

“Pelonggaran lebih lanjut akan dilakukan setelah dilakukan asesment menyeluruh. BI juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah,” jelas Tirta.

Lebih lanjut kata Tirta, BI menilai bahwa ketidakpastian pasar keuangan global sudah mereda setelah pengumuman kenaikan Fed Fund Rate dan sudah diantisipasi pasar lebih awal.

“Perbaikan ekonomi AS masih tertahan sejalan dengan masih lemahnya indikator perekonomian,” tegas dia. *Busthomi*



Jokowi Bentuk Badan Restorasi Gambut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia serius untuk menangani kerusakan gambut yang salah satunya melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Kita bisa yakinkan dunia internasional (kita) serius, sangat serius untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan gambut,” kata Presiden Jokowi saat mengumumkan terbentuknya BRG di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Adanya kebakaran lahan dan hutan yang melanda beberapa provinsi di Tanah Air pada 2015, menjadikan pelajaran tersendiri yang sangat berharga bagi pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla.

Untuk itulah, Presiden membentuk Badan Restorasi Gambut

melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016.

“Saya ingin menyampaikan telah terbentuknya Badan Restorasi Gambut melalui Perpres yang sudah saya tanda tangani Januari lalu,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memperkenalkan Nazir Foead untuk memimpin BRG.

Presiden menugaskan BRG untuk segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya.

Upaya ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia serius untuk mengatasi kerusakan gambut.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa terjadinya kebakaran hutan di beberapa daerah di Tanah Air harus menjadi pelajaran.

“Meski 18 tahun kasus ini selalu berulang. Ini harus jadi pelajaran berharga,” ucap Presiden. *Nebby*

Mulai 2016, OJK Akan Terapkan Pengawasan Konglomerasi

Tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan dan menjalankan fungsi pengawasan konglomerasi atau pengawasan terintegrasi, baik dari regulasi maupun pelaksanaan pada sektor jasa keuangan.

Rencana bisnis bank di 2016, OJK sudah menerima rencana bisnis dari 118 bank, dan hari ini sudah mulai ada proses pengawasan bank untuk memperoleh pandangan bahwa target bisa tercapai.

“Dari rencana bisnis yang diterima total aset itu secara industri direncanakan tumbuh 12,5 persen,” jelas Deputy Komisioner Pengawasan Perbankan OJK Irwan Lubis, pada acara seminar Konglomerasi Jasa Keuangan Indonesia di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (13/1).

Ia merincikan dalam kelompok buku satu 46 bank hanya 20,18 persen. Buku 2 terdapat 48 bank dan tumbuh 13,15 persen, buku 3 ada 20 bank dengan pertumbuhan 10,79 persen, sedangkan buku 4 berjumlah 4 bank dengan pertumbuhan 13,16 persen,”

Pelaksanaan pengawasan konglomerasi dari OJK diidentifikasi ada 50 entitas keuangan sebagai entitas yang masuk ke pengawasan konglomerasi keuangan.

“Jadi, dari 50 entitas ini bisa vertikal bisa horizontal, anak usaha, sister company, bisa level 2 dan 3 ada di peraturan OJK,” terangnya.

Dari 50 konglomerasi keuangan tersebut menguasai 80 persen dari total aset industri perbankan. Adapun total aset secara nominal mencapai Rp5.127 triliun. *Arbie Marwan*



Membaranya Hubungan Saudi-Iran

Rusaknya hubungan Iran-Saudi membuat kawasan Timur Tengah semakin panas. ISIS dan Israel diuntungkan. Indonesia berinisiatif, untuk mencoba menjadi penengah.

Politik di Timur Tengah itu cepat berubah seperti bukit-bukit di gurun pasir. Pernyataan itu tampaknya ada benarnya, sesudah Arab Saudi mengeksekusi seorang ulama Syiah, Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, yang sering mengeritik monarki Saudi. Dari situ muncullah reaksi berantai yang berujung ke putusnya hubungan diplomatik Saudi-Iran.

Eksekusi mati al-Nimr pada 2 Januari 2016 mendapat kecaman dari Irak, Iran, dan beberapa pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga menyulut krisis regional di Timur Tengah. Pengunjuk rasa Iran menyerbu kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran pada 3 Januari 2016. Polisi berhasil membubarkan massa yang sudah masuk ke dalam gedung. Namun insiden ini menjadi alasan bagi Saudi untuk langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Al-Nimr adalah ulama Syiah yang paling vokal memperjuangkan kesetaraan Syiah dengan Sunni di Saudi. Nimr dianggap teroris oleh Riyadh, tapi dipuji Iran sebagai pemerhati hak-hak kelompok Syiah yang minoritas dan terpinggirkan di Saudi. Al-Nimr termasuk salah satu dari 47 orang yang dihukum mati, setelah dihukum karena kejahatan "terorisme."

Al-Nimr adalah pendukung protes anti-pemerintah yang meletus secara massal di provinsi timur Arab Saudi pada 2011. Dia



Api berkobar dari Kedutaan Besar Arab Saudi saat demonstrasi di Teheran, Sabtu (2/1). Warga Iran menyerbu Kedubes Arab Saudi di Teheran pada Minggu dini hari ketika Muslim Iran bereaksi dengan kemarahan atas hukuman mati dari Arab Saudi terhadap ulama terkemuka Syiah.

mengeritik pemerintah dan menuntut diselenggarakannya pemilihan umum. Penangkapannya dua tahun lalu, di mana ia ditembak, memicu kerusuhan sehari-hari karena pendukungnya yakin Al-Nimr tidak pernah menganjurkan kekerasan. Hukuman mati untuk Al-Nimr dikonfirmasi pada Oktober 2015. Beberapa analis meyakini, eksekusi ini juga akan memperdalam jurang perbedaan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah di kawasan Timur Tengah.

Pada 4 Januari 2016, Riyadh mengumumkan, semua penerbangan dari dan ke Iran dibatalkan. Di hari itu juga, Bahrain mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran. Bahrain dikuasai seorang raja Muslim Sunni tetapi berpenduduk mayoritas Syiah. Bahrain menuduh Iran "meningkatkan campur tangan yang berbahaya" terhadap masalah dalam negeri negara-negara Teluk dan Arab.

Bahrain memandang serangan ke kedutaan Saudi sebagai bagian dari "polo kebijakan sektarian

yang sangat berbahaya dan harus ditangani...untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan secara keseluruhan". Bahrain, yang merupakan tempat Armada ke-lima Angkatan Laut Amerika Serikat, sering menuduh Iran mendukung pemberontakan Syiah, setelah terjadinya gejolak Arab Spring tahun 2011.

Uni Emirat Arab menurunkan tingkat hubungan diplomatiknya dengan Iran, menjadi tingkat Kuasa Usaha. Beberapa negara Arab Teluk tidak ikut memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran, mereka adalah Kuwait, Qatar, dan Oman. Dukungan diplomatik terhadap Arab Saudi pun menyebar ke Afrika. Sudan dan Djibouti memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Situasi Semakin Runyam

Rusaknya hubungan Saudi-Iran akan menambah runyam upaya penyelesaian berbagai masalah skala besar di kawasan itu, mulai dari krisis Suriah sampai konflik Yaman. Iran dan Saudi mendukung kelompok yang bertentangan di Suriah dan Yaman. Di Suriah, Iran mendukung rezim Bashar al-Assad, sementara Saudi mendukung kelompok oposisi bersenjata. Di Yaman, Iran dituding mendukung kelompok

pemberontak al-Houthi, sedangkan Saudi mendukung pemerintah yang pro-Saudi.

Pada Maret 2015, Saudi melancarkan operasi militer di Yaman untuk menggempur Houthi, minoritas Syiah yang berhasil mengambil alih istana kepresidenan. Saudi dan beberapa negara Sunni lain menuding, Houthi dipersenjatai dan dibiayai oleh Iran. Namun, Iran membantah tuduhan tersebut.

Kekhawatiran akan konflik yang berpotensi meningkat di Timur Tengah membuat Amerika Serikat ikut bicara. AS yang mendukung Arab Saudi meminta para pemimpin negara di kawasan tersebut untuk membantu mengurangi ketegangan. "Amerika Serikat sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menyusul terjadinya eksekusi di Arab Saudi, serangan terhadap properti diplomatik Arab di Iran, pengurangan hubungan diplomatik dengan Iran," kata John Kirby, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Rusia dan China, dua pemain geopolitik terbesar di dunia menyatakan agar kedua negara menahan diri. "Moskow prihatin tentang situasi yang terjadi di Timur Tengah, terutama antara dua pemain kuncinya (Arab Saudi dan Iran)," kata Kementerian Luar Negeri Rusia. Rusia menyerukan agar Saudi dan Iran bisa menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang mungkin meningkatkan ketegangan, termasuk ketegangan antar-agama.

Peningkatan konflik yang sudah tinggi sejak bertahun-tahun lalu ini dikhawatirkan oleh China. "Seperti komunitas internasional, China sangat khawatir akan perkembangan masalah itu dan menyatakan kecemasan bahwa peristiwa tersebut bisa meningkatkan konflik di Timur Tengah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.

Sebetulnya tidak ada yang mendapat manfaat dari rusaknya hubungan Saudi-Iran, kecuali Israel dan kelompok ekstrem ISIS (Negara

Islam di Irak dan Suriah). Posisi ISIS di Suriah dan Irak kini sedang terdesak oleh serangan militer lawan-lawannya. Sejak terjadinya serangan teror Paris, berbagai negara sudah sepakat untuk menghabisi ISIS.

Namun rusaknya hubungan Saudi-Iran ini menyebabkan perpecahan, yang bisa dimanfaatkan oleh ISIS.

Sedangkan Israel menganggap Iran sebagai musuh dan ancaman keamanan yang terbesar di Timur Tengah. Rusaknya hubungan Saudi-Iran membuat Iran makin terisolasi, dengan terjadinya pemutusan hubungan diplomatik oleh sejumlah negara Arab dan Afrika, yang mengikuti langkah Saudi.

Terjadinya kesepakatan perjanjian nuklir antara Iran dengan AS, Rusia, China, Jerman, Inggris, dan Persancis, membuat Saudi dan Israel tidak senang. Iran bersedia diinspeksi fasilitas nuklirnya dan meredam kemajuan teknologi pemerikayaan uranium, dengan imbalan dicabutnya sanksi-sanksi ekonomi. Ini membuat Saudi dan Israel tidak suka, dan mereka mati-matian menghambat, tetapi gagal.

Karena adanya kesepakatan nuklir inilah, diduga Iran tidak akan memperluas konfliknya dengan Saudi, apalagi sampai ke tahap konfrontasi militer. Kepentingan utama Iran adalah segera dibebaskannya negeri para mullah



Retno LP Marsudi

itu dari sanksi-sanksi ekonomi, yang menghambat ekonomi. Konflik terbuka baru dengan Saudi akan mempersulit pembebasan Iran dari sanksi-sanksi.

Iran Menyatakan Penyesalan

Buktinya, dalam surat kepada PBB, Iran menyatakan penyesalan atas serangan pengunjuk rasa di Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran, akibat eksekusi Al-Nimr. "Republik Islam Iran menyampaikan penyesalan atas insiden ini dan tentu akan melakukan upaya penangkapan dan peradilan bagi pelakunya," demikian penggalan surat bertanggal 4 Januari 2016. Iran juga menyatakan akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang. Iran juga menyatakan bahwa lebih dari 40 demonstran sudah diidentifikasi, ditahan, dan diserahkan ke otoritas pengadilan. Kini, sedang dilakukan penyelidikan mendalam.

Sementara itu, guna mencari solusi terbaik melalui jalan damai, Indonesia menyatakan siap menjadi mediator jika disetujui oleh pihak-pihak yang berkonflik. Tawaran tersebut disampaikan oleh Menlu Retno LP Marsudi, saat menghubungi Menlu Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, juga Menlu Iran, Mohammad Javad Zarif, pada 4 Januari 2015. "Indonesia siap untuk memberikan good offices," ujar Retno.

Retno menyampaikan keprihatinan terhadap perkembangan hubungan antara Arab Saudi dan Iran dan menekankan pentingnya penyelesaian secara damai. Retno menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas kawasan, di mana Saudi dan Iran memegang peranan penting.

Juru Bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, mengatakan, saat berbicara dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Iyad Ameen Madani, Retno menyampaikan harapan agar lembaga tersebut dapat berkontribusi positif untuk membantu menjaga stabilitas kawasan. ● Satrio Arismunandar

Gelombang Gravitasi Ditemukan, Awal Ketahui 'Rahasia' Alam Semesta



Lawrence M. Krauss
@LKrauss1

Follow

My earlier rumor about LIGO has been confirmed by independent sources. Stay tuned! Gravitational waves may have been discovered!! Exciting.

RETWEETS
3,231

LIKES
2,538



7:46 AM - 11 Jan 2016



Apakah gelombang gravitasi itu? Mengapa kita harus paham dan mengetahui terhadap terobosan penemuan serta pengkajian ilmiah tersebut?

Penemuan ilmiah fenomenal dari teori terkenal Albert Einstein akan mengungkapkan, beberapa rincian informasi penting tentang bagaimana Alam Semesta ini terbentuk.

Gelombang Laser Interferometer Gravitational Observatory (LIGO) mampu menemukan gelombang gravitasi, setelah para ilmuwan meneliti selama bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa gravitasi Alam Semesta itu memang benar ada.

Dalam istilah sederhananya, gelombang gravitasi secara teoritis merupakan riak dalam kelengkungan ruang-waktu. Dan, sekarang ini bisa membantu manusia khususnya ilmuwan lebih memahami bagaimana Alam Semesta ini terbentuk.

Teori Einstein. Ide ilmiah munculnya gelombang gravitasi pertama kali dicetuskan oleh Albert Einstein pada tahun 1915 silam dalam teorinya tentang relativitas.

Einstein percaya, bahwa fenomena gravitasi Alam Semesta itu mungkin ada, tapi manusia tidak akan pernah memiliki alat untuk mendeteksi gravitasi tersebut.

Namun, saat ini peneliti memiliki peralatan canggih dalam mendeteksi gelombang yang hanya berukuran sangat kecil yakni semiliar lebar atom.

Untuk diketahui, gelombang gravitasi tercipta sebagai akibat dari "ledakan" atau peristiwa "gesekan" di Alam Semesta. Seperti 'Supernova' atau terbentuknya lubang hitam (*black hole*).

Seperti lubang hitam yang memancarkan cahaya, gelombang gravitasi Alam Semesta telah terbukti sangat sulit untuk dipelajari. Tapi, gelombang gravitasi secara teoritis akan melewati berbagai obyek langit, di mana fisikawan bisa mempelajarinya lebih detail, dalam mengungkap benda-benda langit yang tetap menjadi 'misteri' hingga sekarang.

Terciptanya Alam Semesta. Jika gelombang gravitasi Alam Semesta

terlihat secara kasat mata, Astronom juga bisa menggunakannya untuk mengintip Alam Semesta dalam bentuk cahaya yang berbeda. Dan, bahkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari terciptanya Alam Semesta itu sendiri. Karena, permulaan Alam Semesta, berasal dari peristiwa "Big Bang".

Teori Einstein mengungkapkan, bahwa gelombang gravitasi akan bergerak untuk menjelaskan bagaimana massa mempengaruhi bentuk ruang. Misalnya, seperti ketika batu dijatuhkan ke dalam air dan riak pun muncul dari sumber tersebut.

Selain itu, banyak warga dunia yang tidak mengetahui tentang gravitasi Alam Semesta, dan gelombang gravitasi itu bisa membantu para ilmuwan 'melukiskan' gambaran yang lebih jelas tentang ukuran dan bentuk Alam Semesta itu sendiri.

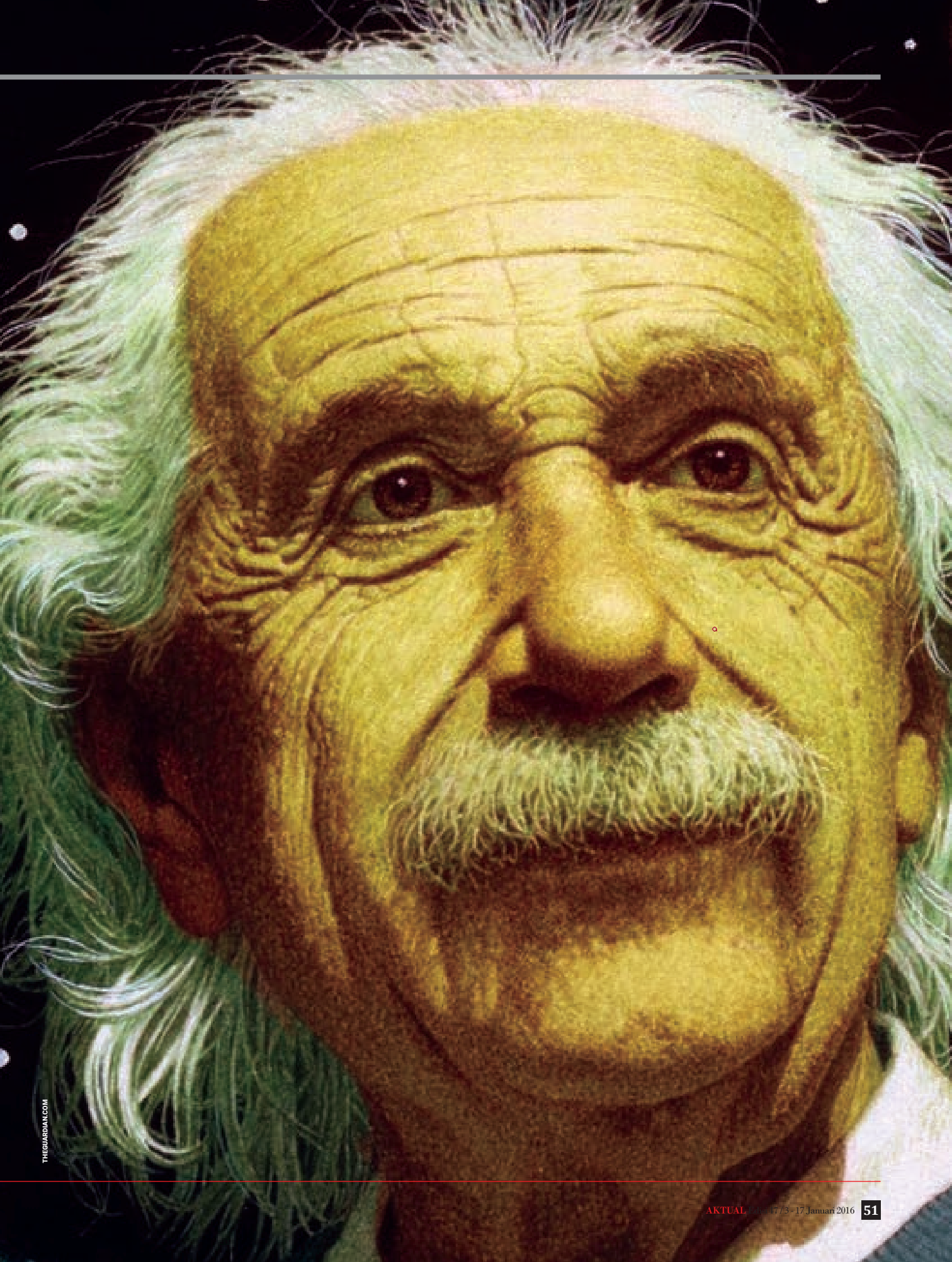
Gravitasi Ditemukan! Kosmolog dari Arizona State University, Lawrence Krauss mulai berspekulasi di dalam Twitter-nya, "Gelombang gravitasi Alam Semesta mungkin telah ditemukan !!," sebelum rumor ini dihembuskan serta diverifikasi oleh Lembaga resmi terkait.

"Kita akan memiliki 'jendela baru' tentang Alam Semesta sebenarnya," kata ia menambahkan.

"Gelombang gravitasi yang dihasilkan ini paling eksotis di seluruh Alam Semesta, lokasi yang paling 'misterius' di Alam Semesta, seperti di tepi lubang hitam di awal waktu."

"Kami cukup yakin mereka (gravitasi Alam Semesta) ada, tapi kami (ilmuwan dunia) belum bisa menggunakannya untuk menyelidiki Alam Semesta."

Pihak ilmuwan masih belum banyak bicara soal hasil riset gravitasi Alam Semesta tersebut. Tapi, diperkirakan peneliti sedang mengkonfirmasi data yang lebih valid dan mengkompilasinya lebih detail dalam sebuah makalah Astronomi Dunia, sebelum mempublikasikannya ke warga dunia. ■ Ferro Maulana



Fakta Penting Dibalik Serangan Teror di Seluruh Dunia

Wartawan mengatakan, tidak ada yang khusus ketika “anjing mengigit manusia”, di sisi lain jika seorang pria mengigit anjing itu baru sebuah berita. Dengan kata lain peristiwa luar biasa pasti menjadi berita utama.

Seperti berita makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Namun, tidak tahu apa yang ada dibalik makanan itu. Berita harus selalu berurusan dengan yang baru, entah itu perkembangan politik atau kasus kekerasan yang ekstrim.

Jika kita lihat kekerasan pada tingkat global, serangan dan perampokan yang tidak biasa itu bisa menjadi berita utama. Jarak juga sesuatu yang penting jika sesuatu terjadi di negara yang jauh, Anda pasti hanya mendengar sebuah cerita yang memiliki beberapa konflik di dalamnya. Seperti seorang politisi yang terkenal dan tinggal di desa yang dibunuh oleh anaknya yang seorang pengacara muda terhormat.

Tentu saja semua orang ingin tahu berita ini mengapa seorang pria muda dengan potensi dan masa depan yang cerah harus berakhir dalam kasus pembunuhan. Selain itu kita harus mengidentifikasi keluarga korban “Apa yang terjadi dan apakah mereka merasa malu?”

Pada akhirnya, kita ingin berita ini menjadi meyakinkan “Coba Anda lihat beberapa politisi sukses memiliki beberapa masalah” mungkin itu akan terlihat sepele. Akan tetapi jika Anda bisa mendapatkan sesuatu yang menarik maka kasus pembunuhan ini menjadi berita utama di seluruh planet ini.

Pentingnya sebuah fakta

Untuk hal ini memang aneh, kami memiliki cerita yang bagus akan tetapi kita tidak memiliki informasi yang banyak tentang yang ada di sekitar. Apakah kita bisa mempercayai politisi dan pengacara saat ini?. Apakah kita perlu takut untuk mengunjungi sebuah desa kecil?. Tentu saja tidak.

Mari kita coba kembali pada

kenyataan apakah teroris itu?. Hal ini tentu merupakan ‘topik panas’ dalam berita, tetapi seberapa bahayanya itu?. Apakah itu membuat banyak korban? Siapa yang harus bertanggung jawab akan hal itu, Kami telah melihat beberapa fakta mudah tetapi ‘mengherankan’.

Contohnya kita mengambil Indeks Terorisme Global yang diterbitkan di London yang berbasis Institut Ekonomi dan Perdamaian. Apakah ini sebuah ringkasan penting yang terungkap serta hanya sebuah kejutan. Dan, apa yang harus kita ingat adalah beberapa fakta-fakta berikut karena mungkin akan

78 persen dari semua korban terkait terorisme yang cepat menyebar.

Fakta 3

Pada tahun 2014 daftar negara yang memiliki lebih dari 500 korban jiwa tewas karena terorisme bertambah menjadi 11 negara yaitu Kamerun, Republik Afrika Tengah, Somalia, Yaman, Sudan Selatan, dan Ukraina.

Fakta 4

Jumlah negara dengan salah satu korban yang mematikan setidaknya naik dari 59 pada 2013 menjadi 67 pada 2014, dan ini menyangkut negara-negara Barat juga seperti Austria, Belgia, dan Prancis. Namun



berguna untuk kita dalam berdiskusi tentang terorisme.

Fakta 1

Pada tahun 2014 jumlah kematian terkait dengan terorisme di seluruh dunia mencapai 32.658 jiwa dan ini 80 persen meningkat jika dibandingkan pada tahun 2000 korban meninggal hanya 3.329 jiwa karena serangan.

Fakta 2

Kebanyakan kekerasan terkonsentrasi hanya di 55 negara yaitu Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Irak, dan Suriah dengan perhitungan

pada skala global hanya 0,5 persen korban dari yang telah terjadi di Barat sejak tahun 2000. Dan, ini tidak termasuk 11 September.

Fakta 5

Di negara-negara barat yang disebut ‘serangan serigala’ terhitung dari tahun 2000 terdapat 70 persen korban jiwa dalam empat sampai lima kasus, itu dilakukan oleh ekstrimis sayap kanan, nasionalis, elemen anti-pemerintah atau supremasisme. Fundamentalisme Islam bukanlah pendorong utama atas semua itu. *Ferro Maulana*



Ditulis Sahabat Rasulullah SAW, Jejak Al Quran di Eropa

Al Quran merupakan Kitab Suci umat Islam. Al Quran lah yang menjadi pedoman manusia dalam menjalankan perintah Allah SWT di muka Bumi ini. Namun siapa sangka bahwa Kitab Suci umat Islam ini justru ditemukan di salah satu negara dengan Islam minoritas.

Beberapa waktu lalu, telah ditemukannya penggalan manuskrip Al Quran tertua, berusia sekitar 1370 tahun, di Universitas Birmingham, Inggris. Ini memiliki makna sangat penting bagi dunia Islam.

Universitas Birmingham selama ini dikenal sebagai salah satu Universitas yang giat mengumpulkan manuskrip kuno dunia Islam. Manuskrip Al Quran tertua itu sebenarnya sudah bertahun-tahun berada dalam koleksi dokumen yang berasal dari Timur Tengah yang jumlahnya mencapai 3000 buah.

Sebagian besar dokumen terutama didapat Alphonse Mingana, Pendeta Kasdim yang lahir dekat kota Mosul di Irak, pada 1920.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Al Quran tertua tersebut sampai di kota Birmingham, Inggris?

Para ilmuwan meyakini bahwa lembaran Al Quran di Birmingham, yang ditulis di atas kulit binatang, sama dengan manuskrip yang disimpan di Perpustakaan Nasional Prancis. Ilmuwan-ilmuwan yang meyakini kesimpulan tersebut di

antaranya adalah ahli sejarah Al Quran, Francois Deroche, yang bekerja di College de Grance dan Alba Fedeli, peneliti yang pertama kali menemukan keberadaan Al Quran di Birmingham.

Deroche menjelaskan bahwa manuskrip Al Quran klasik yang tersimpan di Paris berasal dari koleksi Al Quran di Masjid Amr bin Ash di kota Fustat, Mesir, yang sekarang masuk kawasan Kairo. Amr bin Ash adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjasa menyebarkan Islam di Mesir.

Menurutnya, itu terjadi pada abad 19 dimana Al Quran di Masjid Amr bin Ash dipindahkan ke perpustakaan Nasional di Kairo.

“Pada abad ke-19, Quran dari Masjid Amr bin Ash di Fustat dipindahkan ke Perpustakaan Nasional di Kairo dan dalam proses transfer inilah sejumlah lembaran Quran tersebut “hilang” dan masuk ke pasar benda-benda kuno,” terang Deroche

Setelah beberapa kali berpindah tangan, beberapa lembar di antaranya dibeli oleh Alphonse Mingana pada 1920-an dan dibawa ke Birmingham. Mingana beradal dari Assyria (sekarang menjadi bagian dari negara Irak) yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah atas biaya dari Keluarga Cadbury di Inggris.

Ketika itu Deroche mengatakan, “kemungkinan lembaran-lembaran lain dari Quran yang hilang dari

Masjid Amr bin Ash suatu saat nanti ditemukan,” ungkap Deroche

Manuskrip Al Quran tertua yang ada di Birmingham yang hanya terdiri dari dua lembar ini telah dilakukan uji radiokarbon oleh tim Universitas Oxford yang mengatakan tingkat akurasi pengujian mereka 95 persen. Mereka mengatakan bahwa usia Al Quran tersebut, berasal dari era tahun 568 hingga 645, 13 tahun setelah Nabi Muhammad wafat.

David Thomas, Guru Besar kajian Kristen dan Islam di Universitas Birmingham mengatakan bahwa kemungkinan orang yang menulis Al Quran tersebut hidup di zaman Rasulullah SAW dan mengenal Beliau.

“Orang yang menulis manuskrip tersebut bisa jadi hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan ia mengenal Nabi,” ujar Thomas.

Thomas juga memperkirakan bahwa Al Quran tersebut kemungkinan terdiri dari 200 lembar. Namun yang ditemukan di Birmingham hanya dua lembar saja.

Direktur lembaga pendidikan Yayasan Mohammed bin Rashid Al Maktoum di Uni Emirat Arab, Jamal bin Huwareib, mengatakan lembaran Quran di Birmingham adalah bagian dari Quran yang ditulis ulang oleh Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khalifah pada 632 hingga 634.

“Saya yakin ini berasal dari zaman sahabat Abu Bakar,” kata Huwareib setelah melihat sendiri manuskrip di Birmingham.

Para ahli mengatakan perlu penelitian yang lebih mendalam untuk menentukan secara persis dari era mana Quran ini berasal, tapi apa pun kesimpulannya Quran di Birmingham jelas punya makna yang sangat penting dan mendalam.

“Quran di Birmingham tak ternilai harganya. Keberadaanya di Birmingham, bukan di negara Muslim, mengirim pesan tentang saling toleransi antarumat beragama,” kata Huwareib.

Ferro Maulana / Sumber: BBC.Co.Uk, Daily Mail

Privatisasi

Faizal Rizki

Di sebuah bukunya yang berjudul “Economics of Public Sector” (1988), Joseph Stiglitz mengatakan bahwa kata privatisasi adalah lawan nasionalisasi.

Langkah sebuah negara yang mengambil alih seluruh kepemilikan sebuah perusahaan milik swasta (private) disebutnya sebagai nasionalisasi. Begitu juga sebaliknya. Ketika negara menyerahkan seluruh kepemilikan sebuah perusahaan milik negara ke swasta maka disebutnya privatisasi.

Salah satu alasan mengapa dia menulis buku itu adalah cerita sukses keputusan radikal mantan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher (tahun 1980-an) untuk melakukan privatisasi seluruh BUMN yang ada di Inggris.

Memang saat itu, langkah Thatcher menuai hasil. Hampir seluruh BUMN di Inggris menuai untung ketika seluruh proses bisnisnya dikelola swasta (private). Thatcher yakin akan satu hal bahwa BUMN harus diposisikan murni sebagai sebuah entitas bisnis. Bukan lagi sebuah entitas politik. Itu kuncinya, menurut Thatcher saat itu.

Alhasil, indikator keberhasilan sebuah BUMN harus dilihat dari sejauh apa dia memberikan keuntungan finansial terhadap negara. Semakin besar labanya, maka BUMN itu disebut berkinerja baik. Begitu juga sebaliknya, ketika BUMN merugi terus maka BUMN itu dianggap tak berkinerja baik.

Tapi lain di Indonesia. Bung Karno punya cara pandang sendiri ketika menasionalisasi ratusan perusahaan milik

Belanda saat itu. Bung Karno tujuannya hanya satu: BUMN itu kelak akan menjadi alat penting negara ini untuk berdikari dalam semangat gotong royong.

BUMN di bidang perminyakan misalnya. Bisa jadi kinerjanya sangat bagus, untungnya besar dari hasil ekspornya. Tapi laporan keuangannya justru memperlihatkan bahwa dia tidak untung. Ternyata BUMN tersebut diperintahkan oleh Presiden untuk menutup subsidi yang jumlahnya setara dengan keuntungannya. Secara bisnis, BUMN minyak tersebut jelek. Namun secara politis, kinerja BUMN tersebut sangat bagus.

Begitu pula dengan BUMN di bidang pangan. Karena tuntutan politis agar mampu menjaga harga pangan sesuai dengan daya beli rakyat maka bisa jadi BUMN tersebut kinerjanya secara bisnis jelek namun secara politis mampu menjaga harga pangan pokok tetap stabil.

Itu sebenarnya hakikat peran BUMN di Indonesia. Yang jadi masalah sebenarnya adalah soal akuntabilitas dan transparansi BUMN. Privatisasi sebuah BUMN tidak menjamin bahwa BUMN tersebut akan transparan dan akuntabel. Banyak cara agar sebuah BUMN bisa transparan dan akuntabel.

Dan kita harus pahami bersama bahwa tugas BUMN di Indonesia bukan mencari untung saja. Tapi harus bersedia rugi agar rakyat mendapat untung.

Mungkin kelak akan ada sebuah momen seremoni tahunan untuk menilai kinerja sebuah BUMN dimana terpilih BUMN berkinerja keuangan terbaik namun dengan catatan BUMN tersebut kerugian keuangannya terbesar diantara BUMN lainnya.

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

 **Dedy 081 20 53 8776**
Rhiza 081 828 0941 009

 **marketing@aktual.com**
iklan@aktual.com

memberi anda
perspektif
yang berbeda ...



aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

AKTUAL
MAGAZINE

aktual 

Info Dan Pemasaran :

☎ **081517933376** (Dedy) **081280941009** (Rhiza)

✉ **iklan@aktual.com** | **marketing@aktual.com** | **sirkulasi@aktual.com**

🌐 **www.aktual.com**